PERANAN WANITA INDONESIA DALAM MASA PERGERAKAN NASIONAL

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1992

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

PERANAN WANITA INDONESIA DALAM MASA PERGERAKAN NASIONAL

Tim Penulis :

G.A. Ohorella
Sri Sutjiatiningsih
Muchtaruddin Ibrahim

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1992

Koreksi Naskah :
Soejanto

Penyunting :
Sri Sutjiatiningsih

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa.

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Jakarta, Oktober 1992
Direktur Jenderal Kebudayaan



Drs. GBPH. Poeger
NIP. 130 204 562

PENGANTAR

Buku "Peranan Wanita Indonesia Dalam Masa Pergerakan Nasional" merupakan salah satu hasil pelaksanaan kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1990/1991.

Buku ini memuat uraian tentang Peranan Wanita Indonesia Dalam Masa Pergerakan Nasional. Dimulai dari tumbuhnya perkumpulan-perkumpulan wanita di Indonesia, kegiatan wanita Indonesia pada zaman penjajahan Belanda, kegiatan wanita Indonesia pada masa pendudukan Jepang, dan peranan mereka dalam menyambut kemerdekaan.

Penelitian dan Penulisan Peranan Wanita Indonesia Dalam masa pergerakan Nasional dimaksudkan untuk melengkapi buku Peranan Wanita di Masa Perang Kemerdekaan yang telah diterbitkan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kesejarahan dan memberikan informasi yang

memadai bagi masyarakat peminatnya serta memberi petunjuk bagi kajian selanjutnya.

Jakarta, Oktober 1992
Pemimpin Proyek Inventarisasi dan
Dokumentasi Sejarah Nasional



Dra. Sri Sutjiatiningsih
NIP. 130 422 397

DAFTAR ISI

		Halaman
Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan		vii
Pengantar		ix
Daftar Isi		xi
Pendahuluan		1
Bab I	**Tumbuhnya Perkumpulan-perkumpulan Wanita**	3
Bab II	**Kegiatan Wanita di Masa Pemerintahan Belanda**	13
Bab III	**Peran dan Aktivitas Wanita di Masa Jepang**	33
3.1.	Mengikuti Kegiatan Badan Resmi Jepang	33
3.2.	Beberapa Reaksi Kaum Wanita terhadap Jepang	42
Bab IV	**Peranan Wanita dalam Menyambut Kemerdekaan**	58
Penutup		87
Daftar Pustaka		92

PENDAHULUAN

Peranan wanita Indonesia dalam menegakkan kehidupan bangsa tidak dapat diabaikan begitu saja. Sudah sejak lama mereka terjun dalam perjuangan bahu-membahu dengan kaum pria untuk mewujudkan cita-cita bangsa, termasuk pada masa Pergerakan Nasional. Seperti telah diketahui, masa Pergerakan Nasional adalah suatu masa di mana bangsa Indonesia dalam perjuangannya untuk melepaskan diri dari penjajahan asing tidak mengandalkan lagi pada kekuatan senjata, melainkan dengan menggunakan suatu organisasi yang teratur. Kesadaran akan perlunya suatu organisasi dalam mewujudkan cita-cita mereka, menyebabkan pula periode ini disebut Kebangkitan Nasional. Masa ini ditandai dengan lahirnya Budi Utomo pada 8 Mei 1908 yang kemudian diikuti oleh tumbuhnya perkumpulan-perkumpulan pemuda lain. Pada dasarnya tujuan perkumpulan-perkumpulan pemuda tersebut adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam perkembangan lebih lanjut kaum pergerakan sadar bahwa kemerdekaan itu akan lebih cepat tercapai dengan adanya persatuan di antara mereka. Untuk itulah mereka mencoba menggalang persatuan yang tercermin dalam peristiwa Sumpah Pemuda 28 Mei 1928.

Tumbuhnya perkumpulan-perkumpulan pemuda itu tidak terlepas dari pengamatan kaum wanita. Mereka pun bangkit bergerak untuk mendirikan perkumpulan-perkumpulan wanita. Mula-mula kegiatan mereka ditekankan pada perbaikan ke-

dudukan sosial dalam perkawinan dan keluarga serta peningkatan kecakapan sebagai ibu dan pemegang rumah tangga. Dalam perkembangan lebih lanjut kegiatan mereka ini berkembang sesuai dengan tuntutan zamannya. Ketika pada 28 Oktober 1928 dilangsungkan Kongres Pemuda yang menghasilkan Sumpah Pemuda, cakrawala perhatian wanita pun berkembang pula. Perhatian mereka terhadap kegiatan politik semakin nampak. Mereka pun menyatakan diri bahwa perjuangan mereka tak terpisahkan dengan perjuangan bangsa. Untuk menyatukan gerak, mereka mengadakan kongresnya yang pertama pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta.

Penulisan buku Peranan Wanita di masa Pergerakan Nasional dimaksudkan untuk menyajikan gambaran peranan wanita di masa tersebut, bagaimana pertumbuhannya maupun perkembangannya sehingga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan bangsa, peranan mereka di masa penjajahan Jepang dan peranan mereka dalam menyambut kemerdekaan.

Apa yang dipaparkan dalam laporan penelitian ini barulah sampai pada kumpulan data dari kegiatan dan peranan wanita yang pernah terjadi di masa Pergerakan Nasional; dengan demikian laporan hasil penelitian ini bukanlah sebuah catatan yang lengkap apalagi sempurna, bahkan disadari sepenuhnya masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan ini. Apa pun hasil yang telah dicapai oleh tim, tak akan tercapai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Kepada semua pihak baik lembaga maupun perorangan yang telah membantu memperlancar jalannya penelitian, disampaikan terima kasih. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat, khususnya bagi kajian lebih lanjut tentang peranan wanita.

BAB I
TUMBUHNYA PERKUMPULAN-PERKUMPULAN WANITA

Sejak awal abad ke-19, beberapa wanita Indonesia telah tampil di panggung sejarah secara perorangan dalam membela tanah air dan bangsanya, misalnya Christina Martha Tiahahu, Nyi Ageng Serang, dan Cut Nyak Dien. Pada masa itu, umumnya masih banyak wanita Indonesia yang terbelenggu dalam adat istiadat kolot sehingga mereka seakan-akan terkucilkan dari masyarakat ramai dan bidang pendidikan. Keadaan umum kaum wanita ini berlangsung sampai menjelang akhir abad ke-19.

Pada akhir abad ke-19 ini rakyat Indonesia di kalangan atas maupun di kalangan rakyat kebanyakan mulai nampak membutuhkan perbaikan-perbaikan secara menyeluruh, karena perubahan tidak dapat hanya menyangkut kaum pria saja tanpa perbaikan golongan wanitanya. Walaupun waktu itu kedudukan sosial wanita disepelekan, namun peranannya sebagai istri di dalam keluarga maupun sebagai ibu yang memberikan fungsi dan hak hidup kepada anak-anaknya di dalam rumah tangga, adalah suatu peranan yang sangat besar bahkan sebagai "teman setia" suami menuju cita-cita yang hendak dicapai yaitu "mendidik putra-putrinya sehingga menjadi manusia yang baik dan berbudi luhur, soko guru-guru masyarakat, kebanggaan tanah air dan bangsa".([1])

Perubahan-perubahan dalam politik penjajahan Pemerintah Belanda pada masa itu adalah sebagai akibat adanya pergeseran kebijaksanaan ekonomi dari sistem monopoli ke sistem permodalan swasta sehingga membawa beberapa pengaruh terhadap kehidupan umum dalam masyarakat Indonesia. *Etische Politiek* yang mengandung tiga unsur utama merupakan salah satu sarana untuk menunjang politik ekonomi baru itu. Ternyata pendidikan menduduki tempat yang penting sebagai faktor yang mempengaruhi proses transformasi dalam masyarakat.(2) Pendidikan itu kecuali memberi latihan-latihan praktis pada taraf permulaan, pada akhirnya tujuan yang ingin dicapai adalah kesejahteraan dan peningkatan derajat dan persamaan kedudukan dalam masyarakat.(3) Pendidikan akan membuka keterasingan dan pikiran serta dapat menerima pemikiran-pemikiran maupun ilmu pengetahuan baru dari luar.

Sekolah-sekolah kelas satu mulai dibuka untuk anak-anak golongan priyayi dan pegawai negeri dan sekolah kelas dua bagi anak-anak bumiputra pada umumnya. Hasil pendidikan itulah yang kemudian membuahkan timbulnya pergerakan nasional pada awal abad ke-20. Dengan adanya perjuangan pergerakan nasional, kaum wanita pun merasa mendapat kesempatan untuk turut serta dalam perjuangan untuk mencapai kemajuan dan kemerdekaan bangsa.

Pergerakan wanita yang timbul pada awal masa pergerakan itu masih bersifat perorangan dan kelompok-kelompok tertentu, namun mereka mempunyai tujuan sama yaitu ingin memajukan kerjasama untuk kemajuan wanita khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tujuan yang sederhana itu telah merupakan suatu langkah maju dalam proses pembaharuan kemasyarakatan yang sebelumnya tidak terlalu memperhatikan peranan wanita. Muncullah gagasan-gagasan yang mengarah pada pembentukan perkumpulan-perkumpulan.(4)

Perkumpulan-perkumpulan wanita yang tumbuh ketika itu tentu tidaklah muncul secara tiba-tiba, melainkan sangat erat hubungannya dengan Pergerakan Kebangsaan Indonesia di ber-

bagai bidang kehidupan. Berbarengan dengan itu cita-cita Kartini yang tersebar melalui buku *Door duisternichs totlicht* menciptakan nuansa-nuansa baru dalam pemikiran kaum wanita terutama di kalangan atas. Mereka ini lalu berusaha mendobrak dan menghilangkan persepsi pemerintah kolonial maupun kekurangan tradisional tentang wanita.

Dengan terjadinya perubahan-perubahan di awal abad ke-20 dan berdirinya Budi Utomo, terjadi pula perubahan itu di kalangan wanita. Budi Utomo yang bersumber dari kaum terpelajar mempunyai pandangan baru tentang wanita. Perubahan dan perbaikan tidak dapat hanya menyangkut kaum pria saja tanpa perbaikan kaum wanitanya.([5]) Adanya dukungan seperti itu mendorong kaum wanita bergerak membentuk perkumpulan yang ketika itu baru menekankan "perjuangannya" pada perbaikan kedudukan sosial dalam perkawinan dan keluarga, dan peningkatan kecakapan sebagai ibu dan pemegang rumah tangga.

Usaha-usaha seperti itu telah dirintis oleh Raden Dewi Sartika sejak tahun 1904. Dengan kemampuan yang ada padanya, ia membuka semacam bentuk pendidikan untuk memberi pengajaran dan meningkatkan keterampilan khusus wanita di Jawa Barat. Pendidikan yang dikoordinasi oleh Dewi Sartika kemudian dikenal dengan Sekolah Istri atau Sekolah Gadis yang dibuka pada 16 Januari 1904. Sekolah yang mulai dibuka di daerah Paseban – Bandung itu, ternyata mempunyai pengaruh yang cukup luas. Anak-anak gadis atau kaum wanita yang telah tamat dari Sekolah Istri (kemudian terkenal sebagai Kautamaan Istri) dapat mendirikan sekolah-sekolah yang sama di tempat lain. Di antaranya Kautamaan Istri Tasikmalaya yang didirikan tahun 1913, Kautamaan Istri Sumedang (1916), dan Kautamaan Istri Padang Panjang yang didirikan oleh salah seorang Alumni Kautamaan Istri Bandung pada tahun 1915. Secara sporadis sekolah-sekolah seperti itu dibuka dan perkumpulan-perkumpulan serta bentuk kelompok terbatas tumbuh di mana-mana.

Setelah berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 disusul dengan penyelenggaraan kongres-kongresnya, dampak positifnya terutama terhadap wanita terpelajar semakin meluas. Usaha untuk mengikuti jejak Budi Utomo cenderung meningkat. Pada tahun 1912, berdiri Putri Mardika dengan dukungan kuat dari Budi Utomo. Organisasi atau perkumpulan ini terbentuk di Jakarta dengan tujuan antara lain, memberikan bantuan, bimbingan dan penerangan kepada gadis-gadis pribumi dalam menuntut pelajaran serta menyatakan pendapat di muka umum, dan lain-lain hal yang belum pernah diketahuinya.([6]) Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut, Putri Mardika menerbitkan majalah bulanan *Putri Mardika*. Melalui media tersebut diharapkan berbagai ide dan pemikiran maju bisa sampai kepada para wanita di luar Jakarta.

Sementara itu, dalam merealisasi cita-cita Kartini untuk memajukan pengajaran bagi anak perempuan, terutama di Jawa Tengah, pada tahun yang sama (1912), sekelompok wanita dari golongan atas mendirikan perkumpulan *Kartini Fonds* (Dana Kartini) atas prakarsa Tuan dan Nyonya C. Th. Van Deventer. Seperti diketahui C. Th. Van Deventer adalah salah seorang penganjur Politik Etik yang menginginkan kemajuan bagi rakyat di Hindia Belanda. Perkumpulan ini mula-mula didirikan di Semarang kemudian di Jakarta. Tujuannya adalah untuk mendirikan Sekolah-Sekolah Kartini. Berkat usaha yang sungguh-sungguh dari anggota perkumpulan ini dan berbagai pihak yang simpatik terhadap perjuangan Kartini, berdirilah Sekolah Kartini yang pertama di Semarang pada tahun 1913 dan Jakarta pada tahun yang sama. Sekolah-sekolah ini mendidik gadis-gadis dalam berbagai pengetahuan dan keterampilan wanita. Melalui sekolah-sekolah itu kemudian pula muncul para kader yang membentuk perkumpulan-perkumpulan wanita lainnya.

Pada tahun 1914 Sekolah Kartini didirikan juga di Madiun, tahun 1916 di Malang dan Cirebon, tahun 1917 di Pekalongan, tahun 1918 di Indramayu, Surabaya, dan Rembang. Pada waktu yang hampir bersamaan Sekolah Kautamaan Istri di Jawa Barat

pun cepat berkembang. Pada tahun 1913 dibuka sekolah untuk anak perempuan di Tasikmalaya. Tahun 1916 di Sumedang dan Cianjur, tahun 1917 di Ciamis, dan tahun 1918 di Cicurug, Kuningan, dan Sukabumi.([7]) Di samping itu berdiri pula perkumpulan-perkumpulan "kaum ibu" yang yang bertujuan memajukan kecakapan wanita yang bersifat khusus seperti memasak, menjahit, merenda, dan lain-lain. Perkumpulan-perkumpulan tersebut di antaranya adalah Pawiyatan Wanito yang berdiri di Magelang pada tahun 1915, Wanito Susilo di Pemalang tahun 1918, "Wanito Hadi" di Jepara tahun 1915, "Purborini" di Tegal tahun 1917, dan "Wanito Rukun Santoso" di Malang. Sementara –Budi Wanito– berdiri di Solo, –Putri Budi Sejati– di Surabaya, dan –Wanito Mulyo– di Yogyakarta.

Selain itu ada pula perkumpulan-perkumpulan wanita yang bersifat keagamaan (Islam) dengan nama "Sopo Tresno" (1914), yang kemudian pada tahun 1917 menjadi bagian wanita dari Muhammadiyah dengan nama Aisyiah. "Sarikat Siti Fatimah" berdiri di Garut sebagai bagian dari Sarikat Islam dan di Yogya dengan nama "Wanodya Utomo" pada tahun 1920. Kemudian pada tahun 1925 bernama "Sarikat Putri Islam".

Pemikiran tentang kemajuan wanita semakin berkembang. Perkumpulan-perkumpulan tumbuh pula di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Pada 11 Februari 1914, berdiri perkumpulan "Kerajinan Amai Setia (KAS)" di Kota Gedang Sumatera Barat Perkumpulan ini dipimpin oleh Rohana Kudus. Tujuannya adalah meningkatkan derajat kaum wanita dengan mengajarkan baca-tulis huruf Arab dan Latin, mengatur rumah tangga, membuat kerajinan tangan, bahkan mengatur pemasarannya. Untuk mencapai tujuan tersebut Kerajinan Amai Setia juga mendirikan sekolah yang merupakan sekolah pertama untuk anak perempuan di Sumatera. Dari sekolah ini muncul kader-kader wanita yang kemudian bersama Rohana Kudus mendirikan berbagai kursus yang memberikan pengetahuan umum dan keterampilan kepada para wanita yang

sudah bersuami. Dengan kursus itu Amai Setia menginginkan supaya kaum wanita dapat segera menyesuaikan cara hidup dan penghidupannya dengan perubahan zaman. Untuk itu didirikan pula sebuah surat kabar yang diberi nama *Sunting Melayu*. Melalui *Sunting Melayu* dan surat kabar *Tjahaya Sumatera*, Rohana Kudus dan anggota perkumpulan Amai Setia menyebarkan gagasan-gagasan pembentukan perkumpulan untuk mencapai kemajuan bagi wanita.([8])

Di Manado Sulawesi Utara pada 8 Juli 1917, Maria Walanda Maramis mendirikan "Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnya" (PIKAT). Perkumpulan itu berdiri atas prakarsa dan usaha keras Maria serta beberapa nyonya yang memperhatikan perkembangan anak-anak usia sekolah. Pada mulanya perkumpulan ini bertujuan untuk saling membantu dan membicarakan berbagai persoalan yang menyangkut pendidikan anak. Beberapa waktu kemudian segera timbul gagasan yang lebih luas yang dicetuskan Maria dan didukung secara bersama oleh masyarakat Minahasa. Gagasan Maria disebarluaskan melalui surat kabar *Tjahaya Siang* yang mempunyai *oplaag* besar di daerah Minahasa([9]); dengan demikian tumbuh pula cabang-cabang perkumpulan itu di daerah-daerah maupun di desa-desa lain di Sulawesi Utara.

Setelah tahun 1920, jumlah perkumpulan wanita semakin banyak. Timbul perkumpulan-perkumpulan wanita yang bergerak dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang sifatnya pun lebih luas dari perkumpulan-perkumpulan sebelumnya di samping jumlahnya yang bertambah. Hal itu disebabkan karena kesediaan serta kesadaran wanita untuk terlibat dalam kegiatan organisasi lebih meningkat dan kecakapan bertindak dalam berorganisasi semakin maju. Selain itu organisasi politik juga memberi perhatian kepada wanita dan menyokong pendirian bagian wanita dari organisasi bersangkutan.

Di daerah Gorontalo Sulawesi Utara didirikan *De Gorontalosche Mohammedansche Vrauwen Vereniging* pada tahun 1920 dan Putri Setia pada tahun 1928. Yang pertama didirikan

oleh Wanita Islam Gorontalo dan merupakan bagian wanita dari Partai Sarikat Islam. ([10]) Di Yogyakarta berdiri Wanita Utomo dan Wanita Katholik. Wanita Utomo yang berdiri atas prakarsa beberapa istri dari anggota pengurus besar Budi Utomo di Yogyakarta. Pada tahun 1921 Wanita Utomo mempunyai program yang mengarah pada perbaikan kedudukan perempuan pada umumnya, yang tentu dimulai dari istri-istri anggota Budi Utomo sendiri. Sementara wanita Katholik didirikan 26 Juni 1924 di bawah pimpinan RA. Sujadi Darmosaputro Sosroningrat, saudara perempuan Nyi Hadjar Dewantara. Tujuannya adalah mempertinggi martabat wanita Katholik berdasarkan agama, sehingga menjadi anggota gereja dan warga negara yang wajar.

Di Sumatera Barat, pengaruh Amai Setia dan lembaga pendidikannya serta *Dinnyah Putri School* yang didirikan Rahman El Yunusiah pada tahun 1922 menumbuhkan *Vrouwenbond* dan *Meisyeskring* (Perkumpulan Wanita dan Kelompok Gadis) di Payakumbuh dan Padang; demikian pula dengan berdirinya Sarikat Kaum Ibu Sumatera (SKIS) di Bukittinggi, bertolak dari pemikiran untuk kemajuan yang bersumber dari Amai Setia. Pada tahun 1927 berdiri bagian wanita dari Sarekat Ambon bernama "Ina Tuni". Organisasi ini mulai berhaluan politik dengan tujuan membantu aksi-aksi Sarekat Ambon dalam membela kepentingan orang-orang Ambon di kalangan militer.

Seiring dengan itu corak kebangsaan mulai masuk dan mempengaruhi perkumpulan-perkumpulan meskipun belum jelas benar. Hal itu merupakan suatu dorongan, sehingga dirasa perlu untuk mengadakan hubungan dan ikatan di antara perkumpulan-perkumpulan wanita. Perubahan ini rupanya disebabkan karena pengaruh propaganda kebangsaan dari PNI yang berdiri pada tahun 1926. Organisasi-organisasi pemuda terpelajar juga mendirikan bagian wanita seperti *Yong Java Meisyeskring* bagian wanita dari *Yong Java, Jong Java Dames Afeeling*, Wanita Taman Siswa, *Yong Islameiten Bond Dames Afdeeling* (JIBDA), dan Putri Indonesia.

Menjelang tahun 1928 perkumpulan-perkumpulan wanita berkembang semakin pesat. Di Sulawesi Utara setelah berdirinya Putri Setia di Manado, cabang-cabang perkumpulan ini tumbuh di berbagai tempat di daerah itu. Organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) mendirikan bagian wanita dengan nama "Wanita Perti", dan di Jakarta berdiri "Wanita Sahati". Di samping jumlah perkumpulan yang semakin banyak ruang lingkup dan cara perjuangan perkumpulan-perkumpulan itu beraneka ragam. Ada perkumpulan yang sudah menganut paham nasionalisme, ada yang berhaluan politik dan ada yang tidak mencampuri urusan politik sama sekali. Ada pula perkumpulan yang terbatas pada lapisan masyarakat tertentu saja, ada yang keanggotaannya lebih luas, ada perkumpulan yang sekedar berfungsi sebagai perkumpulan keluarga saja, dan ada pula yang sudah mempunyai tujuan yang konkret. Perkumpulan seperti ini mempunyai kegiatan yang lebih terarah demi kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia.([11])

Putri Indonesia misalnya; perkumpulan ini merupakan bagian wanita dari Pemuda Indonesia yang didirikan di Bandung pada tahun 1927. Tujuannya adalah mengembangkan dan menguatkan cita-cita persatuan Nasional Indonesia. Organisasi ini berkembang di Yogyakarta, Jakarta, Bandung dan Surabaya. Pada tahun 1929 didirikan pengurus besarnya di Bandung yang diketuai oleh Suwarni Djayasaputra. Sementara itu *Jong Islameiten Bond Dames Afdeeling* yang merupakan dari *Jong Islameiten Bond.* berdiri pada waktu yang sama yaitu pada tahun 1925. Motivasi pendiriannya ialah karena Islam menempatkan wanita pada kedudukan yang tinggi dan terhormat, sama dalam kedudukan dan dalam ikatan perkawinan masing-masing tetap mempunyai hak sepenuhnya. JIBDA bertujuan untuk melatih para anggotanya menjadi wanita Islam sejati dan untuk membela serta melindungi hak-hak wanita sesuai dengan ajaran Islam. ([12]) Organisasi ini diketuai oleh Ny. Datuk Tumenggung, kemudian Sapartinah, dan selanjutnya Sukaptinah (Ny. Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito).

Jong Java Dames Afdeeling berdiri di Solo pada tahun 1924 sebagai cabang dari *Jong Java* dengan ketuanya Nona Badiah (Ny. Badiah Sularso). Organisasi ini mempunyai kekhasan tersendiri. Cabang Solo ini merupakan satu-satunya cabang yang beranggotakan seluruhnya putri, sedangkan cabang-cabang lainnya beranggotakan putra dan putri. Itulah sebabnya anggota-anggota putri *Jong Java* yang merupakan seksi *Jong Java Meisjeskring* berbeda dari *Jong Java Dames Afdeeling.*

Perkembangan perkumpulan-perkumpulan atau organisasi wanita di seluruh Indonesia ini sampai tahun 1928 berjumlah kira-kira 50 -- 100 perkumpulan. Sayangnya pada saat berlangsungnya Kongres Perempuan Indonesia Pertama di Yogyakarta yang sempat hadir hanya utusan dari 30 organisasi. Walaupun demikian kongres ini dapat merumuskan tujuannya untuk menjalin pertalian antara perkumpulan-perkumpulan wanita di seluruh Indonesia, dan agar dapat membicarakan soal-soal kewajiban wanita, keperluan, dan kemajuannya secara bersama-sama. Untuk itu dibentuk federasi bersama yang dinamakan Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI). Federasi ini kemudian berubah menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia (PPII).

Setelah era ini sikap perkumpulan atau organisasi wanita semakin tegas, berani, dan terbuka. Selain itu perkembangan ke arah politik semakin jelas.

Istri Sedar misalnya yang berdiri di Bandung pada tahun 1930, semata-mata berhaluan politik. Kemudian organisasi lain pun mengikuti arus perjuangan bangsa, antara lain dengan menyokong kegiatan-kegiatan politik GAPI seperti Indonesia Berparlemen dan Indonesia Merdeka.

CATATAN BAB I

(1) Bahder Johan, *Di Tangan Wanita,* Pidato pada Kongres Pemuda Pertama tahun 1926, Yayasan Idayu, Jakarta 1980, hal. 8.

(2) Rochati Wiriatmadja, *Dewi Sartika,* Depdikbud, Proyek IDSN Jakarta, 1983, hal. 50.

(3) Abdurrahman Suryomihardjo, *Cita-cita Demokrasi Dalam Pendidikan Bangsa,* sebuah tinjauan Historis, Prisma No. 2/1977, hal. 77.

(4) Rochati Weriaatmadja, *Dewi Sartika,* Depdikbud, Proyek IDSN Jakarta, 1980, hal. 49–54.

(5) Leirissa RZ cs *Sejarah Pemikiran Tentang Sumpah Pemuda,* Proyek IDSN, Jakarta, 1989, hal. 126.

(6) KOWANI, *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. . .

(7) *Ibid,* hal. 42.

(8) Depdikbud, *Sejarah Kebangkitan Nasional, Daerah Sumatra Barat,* Proyek Penelitian Kebudayaan Daerah, Jakarta, 1977/1978, hal. 101–102.

(9) MPB Manus, *Maria Walanda Maramis,* Depdikbud, Proyek IDSN, Jakarta, 1982, hal. 16.

(10) Depdikbud, *Sejarah Kebangkitan Nasional, Daerah Sulawesi Utara* Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Jakarta, 1977/1978, hal. 93–94.

(11) KOWANI, *op cit,* hal. 44.

(12) *Ibid,* hal. 49.

BAB II

KEGIATAN WANITA DI MASA PEMERINTAHAN BELANDA

Pada tahun 1928 perkumpulan-perkumpulan wanita berhasil membentuk Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) yang kemudian namanya berubah menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia (PPII) pada tahun 1929 melalui Kongres Perempuan Indonesia Pertama 22 Desember 1928. Hal itu merupakan suatu kemajuan yang diraih wanita Indonesia ketika itu. Berbagai kegiatan telah dilakukan baik secara perorangan maupun melalui perkumpulan-perlumpulan untuk menyampaikan ide-ide dan gagasan kepada sesama wanita dan masyarakat umumnya, sejak awal abad ke- 20. Sampai tahun 1927 kegiatan sebagian besar perkumpulan baru mengarah pada perjuangan untuk mempertinggi kedudukan sosial, sedangkan soal-soal politik belum menjadi perhatiannya.

Dalam usaha penyampaian gagasan, media pers merupakan sarana yang efektif untuk menyampaikan informasi. Sehubungan dengan itu maka setelah berdirinya Keutamaan Istri di Bandung pada tahun 1904, dalam tahun 1909 diterbitkan surat kabar *Putri Hindia* yang diprakarsai oleh wanita dari golongan atas di Bandung di antaranya R.A. Tjokroadikusumo. Di Padang, Sumatera Barat, dalam usaha mendirikan Kerajinan Amai Setia yang dipimpin Rohana Kudus, pada 10 Juli 1912 diterbitkan surat kabar *Sunting Melayu*. Surat kabar ini merupakan

penyebar gagasan pendirian Amai Setia pada tahun 1914. Selanjutnya surat kabar ini merupakan pusat kegiatan para gadis maupun wanita yang telah bersuami dalam menyampaikan anjuran kebangkitan wanita dan menyatakan pikiran-pikiran penulisnya dalam bentuk prosa dan puisi.

Kegiatan serupa dilakukan pula oleh para wanita di Pacitan Jawa Timur di bawah pimpinan Siti Sundari yang kemudian menjadi salah satu pimpinan dalam perkumpulan Putri Budi Sejati Jawa Timur, dan pada tahun 1913 menerbitkan surat kabar *Wanito Sworo*. Surat kabar ini mula-mula terbit dengan huruf dan bahasa Jawa, tetapi kemudian sebagian dengan bahasa Melayu. Begitu pula di Jakarta setelah berdirinya "Putri Mardikha" pada tahun 1912, pada tahun 1914 menerbitkan tabloit atau surat kabar *Putri Mardikha*. Tabloit ini kemudian menjadi majalah bulanan yang memuat artikel-artikel dalam bahasa Belanda, Jawa, dan Melayu. Pada tahun 1918 dibuka pula surat kabar edisi Sunda di Bandung dengan nama *Penuntun Istri*. Melalui media pers itu kaum wanita sangat giat menulis tentang permaduan, pendidikan campuran laki-laki dan perempuan, pemberian kelonggaran bagi wanita dan lain-lain yang merupakan perdebatan.([3])

Demikian juga dengan kaum wanita di Semarang. Perkumpulan "Wanita Utomo" di Semarang menerbitkan surat kabar *Estri Utomo*, sedangkan di Padang terbit sebuah surat kabar lagi dengan nama *Suara Perempuan*. Surat kabar ini dipimpin Nona Sa'adah, seorang guru HIS di Kota Padang. Selain itu di Medan terbit surat kabar *Perempuan Bergerak* dengan pimpinan redaksinya Ny. Satiaman Parada Harahap. Pada tahun 1920 surat kabar ini diperkuat oleh Rohana Kudus sebagai dewan redaksi karena ia pindah dari Sumatera Barat ke Sumatera Utara. Selanjutnya dalam tahun 1925 tercatat tiga surat kabar diterbitkan lagi oleh berbagai perkumpulan wanita, yaitu majalah bulanan *Pikat* di Manado, *Suara Aisyiah* di Yogyakarta, dan *Istri Mardikha* di Bandung.

Para penulis, pengarang, dan pembantu pada surat kabar-surat kabar ini sebagian besar adalah kaum wanita yang sebagian besar dari mereka adalah guru-guru wanita yang sudah menetap pendidikan barat. Dengan begitu usaha pengajaran praktis di sekolah-sekolah dapat dikembangkan dengan penyebarluasan usaha-usaha perbaikan kedudukan wanita dalam masyarakat.

Usaha perbaikan kedudukan wanita melalui pengajaran praktis mulai dirintis oleh RA. Kartini. Dari cita-citanya yang telah dipupuknya selama kurang lebih 10 tahun, pada bulan Juli tahun 1903 dibuka sebuah sekolah gadis dengan tujuh orang murid di pendapa Kabupaten Jepara.[5]) Sekolah yang pertama itu dibuka empat hari dalam seminggu. Rencana mata pelajaran disusun sendiri oleh Kartini, yaitu membaca, menulis, menggambar, pekerjaan tangan wanita, dan memasak. Ia pula yang menjadi guru bersama dua orang saudaranya, Kardinah dan Sunatri. Tujuan mereka adalah agar anak-anak perempuan bisa memperoleh pendidikan, mempunyai jiwa yang bebas tanpa melupakan tata cara, menjadi calon ibu rumah tangga yang terampil serta memiliki watak yang baik. Usaha seperti itu dilakukan pula oleh Raden Dewi Sartika di Bandung Jawa Barat.

Pada tahun 1905 Dewi Sartika berhasil membuka sekolah bagi gadis-gadis setelah melalui berbagai rintangan. Sekolah yang disebut Sekolah Istri atau Sekolah Gadis ini mendapat tantangan dari golongan bangsawan bahkan cemooh dari kaum wanita bangsawan sendiri, namun karena sekolah ini dianggap sebagai sekolah "pioner", maka komentar dan ucapan dari pihak Pemerintah Belanda maupun penguasa pribumi bervariasi, seperti yang dikemukakan oleh Direktur Pendidikan, Kebudayaan, dan Agama Mr. J.H. Abendanon dalam Pameran Kerajinan Wanita yang diselenggarakan di Batavia pada tahun 1913, sebagai berikut (terjemahan) :

"Nanti akan dapat anda lihat bagaimana berdirinya salah satu dari sekolah-sekolah yang pertama, yang di Bandung berhasil didirikan dengan penerangan dari Inspektur pendidikan pribumi waktu itu, tuan C.A. den Hamer, dengan bantuan yang kuat dari Bupati R.A.A. Marta Negara. Yakni dengan menyediakan sebuah bangunan untuk digunakan di dalam Kabupaten. Dengan demikian sekolah berada di bawah lingkungan pengusa pribumi tertinggi, dan orang tua mana akan mundur untuk mengirimkan anak-anak gadisnya ke sekolah". (6)

Pada kesempatan yang sama Abendanon juga mengatakan, bahwa "Bagi anda semua yang berdiam di kota yang belum pernah melihat bahwa di sekolah itu semua anak-anak termasuk anak-anak gadis dapat menikmati pendidikan, pasti akan menganggapnya suatu dongeng. Dan apabila anda mencoba mengunjungi sekolah-sekolah itu sering tanpa perabot-peralatan sekolah yang memadai. Walaupun demikian hal itu telah merupakan suatu langkah kemajuan yang penting. Dengan rasa haru dan salut kita sambut langkah-langkah pertama itu dan terutama kenangan yang indah pada guru-guru putri yang muda belia yang duduk di depan kelas untuk mengajarkan kepada muridnya sedikit pengetahuan yang berhasil mereka kumpulkan sendiri".(7)

Perkembangan Sekolah Gadis atau Sekolah Istri atau Sekolah Kautaman Istri di Jawa Barat maju dengan pesat. Pada tahun 1905 animo para gadis untuk menjadi murid ternyata cukup besar sehingga tempat yang tersedia di halaman Kabupaten Bandung tidak mampu menampung jumlah murid baru. Pada tahun itu juga sekolah dipindahkan ke Jalan Cigurang yang masih digunakan oleh sekolah-sekolah Yayasan Dewi Sartika sampai sekarang.

Penyempurnaan terhadap rencana pelajaran juga dilakukan. Dengan berpedoman pada pola pendidikan yang dijalankan di sekolah-sekolah dasar pemerintah waktu itu, ditetapkan rencana pelajaran baru dengan menekankan pada pelajaran keterampilan wanita seperti menjahit, menambal, menyulam, merenda,

memasak, menyajikan makanan, P3K, memelihara bayi, dan pelajaran agama.

Dalam waktu yang tidak begitu lama di tempat-tempat lain para wanita yang sudah pernah mengikuti pendidikan di Sekolah Istri di Bandung mendirikan sekolah-sekolah di berbagai kota di Jawa Barat, bahkan juga di Sumatera Barat. Demikian pula kegiatan yang dilakukan oleh Maria Walanda Maramis di Sulawesi Utara, tujuannya tidak jauh berbeda dengan kegiatan yang dijalankan Dewi Sartika dan Kartini yaitu demi kemajuan kaum wanita. Perlahan tetapi pasti kaum wanita bergerak melalui berbagai wadah dan membentuk berbagai perkumpulan demi kemajuan kaum dan bangsanya.

Wanita Utama yang berdiri pada tahun 1921 dengan ketuanya R. Ay. Rio Gondoatmodjo, pada mulanya hanya berkecimpung dalam bidang kesejahteraan wanita dan sosial. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain membuka kursus menjahit, memasak, dan menenun. Kursus tersebut diadakan di rumah-rumah pada pimpinan perkumpulan seperti di rumah Ny. Sukanto dan rumah Ny. Bintang Abdulkadir. Di samping kursus-kursus keterampilan kewanitaan, Wanita Utomo juga mengadakan gemblengan dalam hal berorganisasi yang merupakan semacam kaderisasi bagi para anggotanya. Dengan cara ini Wanita Utomo berkembang pesat dan mendirikan cabang-cabangnya di berbagai kota. Pada tahun 1926 Wanita Utomo mengadakan lustrumnya yang pertama di Gedung Loge Mataram Malioboro (sekarang gedung DPRD Tingkat I Yogyakarta) yang dihadiri cabang-cabang dari luar Yogyakarta.

Di bawah pimpinan Ny. Sukonto, seorang ibu rumah tangga yang aktif dan lancar bicaranya, Wanita Utomo berusaha keras meningkatkan derajat kaum perempuan. Aktivitasnya dalam memajukan perkumpulan dan kaum perempuan pada umumnya, dapat terlaksana berkat kerjasama yang terjalin erat di antara para pimpinan dan anggotanya. Dari sini pula tercetus gagasan dan inisiatif untuk mengadakan pertemuan dan pertalian di antara sesama perkumpulan wanita. ([9])

Wanita Katholik yang didirikan pada 26 Juni 1924 oleh RA. Maria Sulastri Darmosaputro Sosroningrat bergerak dalam bidang sosial. Setelah memperhatikan nasib para buruh di Pabrik Rokok Tarumartani Yogyakarta dengan upah yang sangat rendah, Wanita Katholik berupaya untuk memperbaiki nasib mereka sesuai kemampuan perkumpulan dengan program kerja yang digariskan yaitu :

(1) mengadakan kursus menjahit untuk keperluan gereja dan diri sendiri,
(2) mengadakan kursus pemberantasan buta huruf,
(3) mengadakan penitipan bayi (*baby crash*) di pabrik rokok/ cerutu Tarumartani,
(4) mengadakan kursus PPPK, dan
(5) mengadakan perawatan untuk orang sakit di kampung-kampung.

Wanita Katholik turut berusaha untuk memperbaiki kehidupan kaum wanita Indonesia.

Pada tahun 1928, Wanita Katholik ikut dalam pertemuan pertama perkumpulan-perkumpulan perempuan di Yogyakarta dan masuk sebagai anggota Komite Kongres Perempuan pertama tersebut. Dengan dimotori oleh RA. Catarina Sukirin Harjodiningrat dan Raden Ayu Amelia Prihatin Suryo Mursandi, wanita Katholik ikut berpartisipasi secara nyata dalam Kongres Perempuan Indonesia Pertama.

Dalam waktu yang tidak begitu lama Wanita Katholik telah dapat membuka 16 cabang-cabangnya di Pulau Jawa. Pada tahun 1933 -- 1938 Wanita Katholik diserahi tanggung jawab untuk mengurus orang-orang miskin dalam organisasi *Armenzarg*, suatu organisasi yang bergerak dalam bidang sosial, didirikan oleh istri gubernur ORI (Oeang Repoeblik Indonesia).

Demikian pula program kegiatan wanita-wanita Aisyiah di Yogyakarta. Sejak berdirinya organisasi ini pada tahun 1917, mereka giat membimbing kaum wanita ke arah kesadaran beragama dan berorganisasi. Kepada kaum muda selalu dibimbing

supaya menjadi orang Islam yang berarti. Selain itu mereka berusaha keras memperteguh iman orang-orang Islam dengan menggembirakan dan memperkuat ibadah serta mempertinggi akhlak. Kegiatan seperti ini dilakukan melalui *tabliq-tabliq* (pertemuan dan ceramah) serta pendidikan-pendidikan informal dan non-formal. Wanita Aisyiah juga berusaha di bidang sosial yaitu memberi bantuan bagi kesejahteraan umat dengan menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim-piatu. ([10])

Di Manado Sulawesi Utara, para wanita yang tergabung dalam perkumpulan PIKAT (berdiri tahun 1917) juga mengadakan kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan dan sosial. Mula-mula para pendirinya yang dipimpin Maria Walanda Maramis menulis di berbagai surat kabar antara lain *Tjahaya*, untuk menyebarkan ide dan kegiatan mereka. Kemudian dengan kemampuan yang ada, pada tahun 1918 Wanita PIKAT mendirikan sebuah sekolah kerumahtanggaan yang disebut *Huishoud school*. Sekolah ini hampir sama dengan Sekolah Gadis atau Sekolah Kautamaan Istri di Bandung. Dalam waktu yang tidak begitu lama, sekolah-sekolah Wanita PIKAT tersebar di banyak kota kecil di Sulawesi Utara. Sekolah-sekolah itu disebut *Meisjes Vakschool* yang berlangsung sampai tahun 1940an. ([11])

Kegiatan dalam bidang sosial dan budaya terus meningkat bahkan bidang politik pun menjadi ajang kegiatan perjuangan. Hal ini dapat dilihat dengan jelas setelah Kongres Pemuda 1928.

Setelah berlangsungnya Kongres Pemuda Indonesia 28 Oktober 1928 di Jakarta yang diikuti pula oleh kaum wanita, memacu mereka untuk segera menentukan langkah. Dengan semangat Sumpah Pemuda dan atas inisiatif dari tujuh organisasi wanita, terselenggaralah Kongres Perempuan Indonesia yang pertama pada 22 Desember 1928.

Wanita Utomo yang diwakili Ny. Sukonto, bersama Wanita Taman Siswa yang diwakili Nyi Hadjar Dewantara serta RA.

Suyatin yang mewakili Puteri Indonesia Mataram, mengawali gagasan dan inisiatif ke arah itu. Dengan bantuan dari Nn. Sunaryati sebagai juru tulis dan sekaligus sebagai panitia inti, mereka mengundang perkumpulan-perkumpulan wanita lainnya di Yogyakarta untuk bersama-sama menghadiri pertemuan pertama. Dengan didukung oleh empat perkumpulan lainnya, dibentuklah suatu komite yang akan bekerja keras untuk mewujudkan pertemuan organisasi-organisasi wanita Indonesia. Komite yang tersusun atas kesepakatan yang bulat dari semua organisasi yang hadir pada pertemuan itu menunjuk Ny. SA. Sukonto dari Wanita Utomo sebagai ketuanya. Komite ini bertugas memikirkan macam perkumpulan apa yang kiranya dapat memberikan dukungan terhadap maksud tersebut tanpa merasa takut dalam perjuangannya, dan mereka diundang untuk hadir. Setelah seminggu pembentukannya, komite tersebut diberi nama Komite Kongres Perempuan Indonesia. ([12])

Di dalam kongres, Ny. Sukonto selaku ketua mengemukakan pidatonya antara lain, bahwa kaum istri hendaknya mengikuti tuntutan zamannya. Ditegaskan bahwa saat itu sudah tiba waktunya kaum istri diangkat derajatnya sehingga mereka tidak terpaksa duduk di dapur saja. Selain bertugas di dapur, kaum istri juga harus dapat memikirkan apa yang menjadi perjuangan kaum laki-laki, tetapi dengan memikirkan perjuangan kaum laki-laki itu tidak berarti orang perempuan "menjadi laki-laki"; perempuan tetap sebagai perempuan menurut kodratnya yang derajatnya sama dengan kaum laki-laki dalam pergaulan dan perikehidupan. ([13])

Dengan tujuan dan nada yang sama, Siti Munjiah yang mewakili perkumpulan Aisyiah mengemukakan pidatonya berjudul, Derajat Perempuan. Di dalam pidato itu antara lain dikatakan bahwa derap perjuangan telah menggema di hati kaum perempuan Indonesia dan sudah waktunya kaum perempuan mulai maju. Dikatakannya pula bahwa pertemuan seperti itu telah lama dipikirkan oleh Aisyah untuk beramah-tamah bersama kaum perempuan Indonesia agar dapat mem-

bicarakan masalah kepentingan bersama. Bahwa pada dasarnya laki-laki dan perempuan itu sama, yang berbeda adalah kodratnya, jadi perempuan Indonesia haruslah sedapatnya mencari ilmu tanpa takut pada usianya yang telah lanjut ataupun tantangan yang menghadangnya. Haruslah dengan berhati teguh terus berusaha agar tidak menjadi bangsa yang rendah dan miskin. ([14])

Pidato-pidato yang dikemukakan di dalam kongres tersebut pada dasarnya mengenai kemajuan perempuan, yang pada akhirnya mengarah pada suatu kerjasama atau perjuangan bersama kaum laki-laki untuk mencapai persatuan bangsa. Hal itu seperti dikemukakan oleh Siti Soendari dari Putri Indonesia, bahwa persatuan Indonesia tak akan terwujud apabila masing-masing bekerja atas sukanya sendiri. Kita, kaum perempuan khususnya dan bangsa Indonesia umumnya, haruslah saling menghargai apa yang dikerjakan orang lain. Hal itu diungkapkan dalam "bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh". Diungkapkan pula bahwa dalam tangan putri dan istri Indonesialah terpegang bagaimana besarnya bangsa Indonesia dan harumnya tumpah darah Indonesia.

Adapun pidato-pidato yang dikemukakan di dalam kongres itu yakni : ([15])

(1) Kata Pembuka, oleh Ny. Sukonto selaku ketua,
(2) "Perkawinan dan Perceraian", oleh RA. Soedirman dari Putri Budi Sejati,
(3) "Derajat Perempuan", oleh Ny. Siti Mundjiah dari Aisyiah,
(4) "Perkawinan Anak-anak", oleh Nn. Siti Mugarumah dari Putri Indonesia,
(5) "Kewajiban dan Tjita-tjita Poetri Indonesia", oleh Siti Sundari dari Putri Indonesia,
(6) "Bagaimana Jalan Kaum Perempuan Waktu Ini dan Kelak", oleh Tien Sastrowiryo,
(7) "Iboe", oleh Saudara Djarmi dari Darmo Laksmi,
(8) "Salah Satu Wajibnya Orang Perempuan", oleh Siti Z. Goenawan dari Rukun Wanodya,

(9) "Hal Keadaan Istri di Europah", oleh Ny. Ali Sastroamidjoyo,

(10) "Pidato", oleh Entjik Siti Maryam dari *Yong Java Meisyeskring Betawi.*

(11) "Persatuan Manusia", oleh Siti Hajinah dari Aisyiah, dan

(12) "Keadaan Istri", oleh Nyi Hadjar Dewantara dari Wanita Taman Siswa.

Selanjutnya diskusi yang dihadiri juga oleh kaum pria mengambil keputusan-keputusan yang pada dasarnya berpangkal pada kedudukan kaum wanita dalam perkawinan, pendidikan bagi kaum wanita terutama para gadis, dan perlindungan terhadap wanita dan anak-anak dalam perkawinan.

Kesepakatan utama dalam kongres ini ialah membentuk Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI). Keputusan-keputusan yang diambil di dalam kongres merupakan wadah dan langkah bagi perjuangan wanita untuk berjuang bersama kaum pria guna mencapai cita-cita kemerdekaan, persatuan dan kesatuan bangsa.

Setelah Kongres Perempuan Indonesia pertama, kegiatan pergerakan wanita dapat terlihat secara global dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat "Nasional". Dalam pada itu tentu kegiatan-kegiatan secara sendiri-sendiri baik untuk kepentingan anggota perkumpulan maupun yang bersifat kedaerahan tidak dikesampingkan.

Kongres Perempuan Indonesia pertama disusul oleh Kongres Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI). Dalam Kongres PPPI tahun 1929, "badan" ini diubah namanya menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia (PPII). Pada tahun 1930 diadakan Kongres PPII di Surabaya, kemudian pada tahun 1932 diadakan kongres lagi di Solo, dan tahun 1933 Kongres PPII diselenggarakan di Jakarta.

Selama empat kali Kongres PPPI/PPII itu masalah yang menjadi perhatian serta fokus pembicaraan adalah :

(1) Kedudukan wanita dalam Hukum Perkawinan,
(2) Perlindungan wanita dan anak dalam perkawinan,
(3) Mencegah perkawinan anak-anak, dan
(4) Pendidikan bagi anak-anak Indonesia, khususnya bagi anak-anak gadis yang tidak mampu membayar biaya sekolahnya.

Hal-hal di atas menjadi perhatian pertama karena sejalan dengan perjuangan wanita dalam rangka peningkatan harkat wanita sehingga dapat menjadi mitra kaum pria dalam perjuangan bangsa. Hal yang sangat penting dalam perkembangan PPPI/ PPII adalah pernyataan diri bahwa pergerakan wanita Indonesia adalah bagian dari pergerakan kebangsaan Indonesia.

Sehubungan dengan itu, dalam rangka pencapaian cita-cita perjuangan, mass media (surat kabar) merupakan salah satu media yang ampuh dan sangat efektif untuk menyebarkan gagasan, ide dan cita-cita, karena itu setelah kongres Perempuan Indonesia pertama, diterbitkan surat kabar *Istri* di samping surat-surat kabar lain yang telah diterbitkan oleh berbagai perkumpulan wanita sebelumnya. Surat kabar ini redaksinya dipercayakan kepada pengurus PPPI. Anggota redaksinya adalah: Nyi Hadjar Dewantara, Nn. Hajinah (Ny. Hajinah Mawardi), Ny. Ali Sastroamijoyo, Nn. Ismudiati (Ny. Ismudiati Saleh), Nn. Badiah (Ny. Badiah Gularso), dan Nn. Sunaryati (Ny. Sunaryati Sukemi).

Selain menerbitkan surat kabar, PPPI mendirikan *studie fonds* yang akan menolong gadis-gadis yang tidak mampu. *Studi fonds* ini merupakan cikal-bakal dari Yayasan Seri Derma yang membantu membayar biaya sekolah gadis-gadis yang pandai tetapi tidak mampu membayar uang sekolah. Di samping itu PPPI berusaha keras meningkatkan kegiatan dalam pendidikan kepanduan putri.

Masalah politik dan hukum juga menjadi perhatian wanita (PPPI). Mereka mengirimkan mosi kepada pemerintah yang isinya antara lain, (1) menuntut diadakan *fonds* bagi janda dan anak-anak, (2) jangan mencabut tunjangan yang bersifat pensiun, dan (3) sekolah-sekolah putri supaya diperbanyak. Di

samping itu kepada Pengadilan *(Raad)* Agama dikirimkan mosi yang berisi agar setiap talak dikuatkan secara tertulis sesuai dengan peraturan agama. Mengenai berbagai masalah yang menyangkut kepentingan kewanitaan secara menyeluruh (nasional), ditetapkan agar setiap tahun PPPI mengadakan kongres untuk membicarakan kedudukan wanita Indonesia.

Sementara itu para wanita yang tergabung dalam perkumpulan-perkumpulan tertentu juga mengadakan kegiatan-kegiatan. Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesama anggota perkumpulan. Dari sini pula diharapkan adanya pembinaan kepada wanita lainnya yang bukan anggota perkumpulan, tetapi tempat tinggalnya merupakan daerah yang berada dalam jangkauan kegiatan program perkumpulan yang bersangkutan, demikian pula dengan para wanita yang tergabung dalam Wanita Taman Siswa. Perkumpulan yang berdiri pada tahun 1922 ini memulai kegiatannya dengan membantu organisasi Taman Siswa dalam segala usahanya terutama dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan kewanitaan. Sampai tahun 1928, Wanita Taman Siswa dengan struktur organisasi yang masih sangat sederhana turut serta dalam membina pendidikan dan akhlak kaum wanita, yang kemudian dapat menjadi guru-guru pamong pada sekolah-sekolah Taman Siswa.

Di bawah kordinasi Nyi Hadjar Dewantara, Wanita Taman Siswa berupaya mempererat pertalian antara sesama anggota di luar Yogyakarta dan bahkan dengan perkumpulan wanita lain di seluruh Indonesia. Atas dasar itu pula, Nyi Hadjar bersama Ny. Sukonto dari Wanita Utomo dan Nn. Suyatin (Ny. S. Kartowiyono) dari Putri Indonesia dibantu oleh Nn. Sunaryati (Ny. Sunaryati Sukemi), mengajak beberapa perkumpulan wanita di Yogyakarta mengambil inisiatif untuk mengadakan Kongres Perempuan Indonesia. Dengan kongres itu dimaksudkan untuk dapat mempererat pertalian antara perkumpulan-perkumpulan wanita Indonesia. Selain itu masalah-masalah yang menyangkut hak, kewajiban dan kebutuhan serta kemajuan

wanita dapat dibicarakan bersama di dalam suatu pertemuan yang besar.([17]) Untuk kegiatan itu, Wanita Taman Siswa, Wanita Utomo dan Putri Indonesia menulis berbagai artikel dan imbauan melalui surat kabar, majalah dan radio "Mavro" Yogyakarta, hingga terselenggaranya Kongres Wanita Indonesia pertama, 22 -- 25 Desember 1928.([18])

Sesudah Kongres PPPI tahun 1929 di Jakarta dan Kongres PPII tahun 1930 di Surabaya, kegiatan wanita semakin meningkat. Berbagai kegiatan di bidang industri dan ekonomi lebih bervariasi demi meningkatkan pendapatan dan kehidupan wanita, demikian juga bidang hukum, sosial, dan pendidikan. Para pemimpin organisasi wanita mulai memperhatikan nasib para buruh wanita yang bekerja di pabrik-pabrik rokok, pakaian dan batik maupun makanan. Para buruh wanita itu diberi berbagai penyuluhan mengenai hak dan kewajiban mereka. Agar lebih terarah dan teratur, diadakan Kantor Penyuluhan Perburuhan. Di sana diberi petunjuk-petunjuk bagaimana memajukan pertenunan untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Kesehatan mereka juga diperhatikan termasuk kesehatan wanita (para ibu) di kampung-kampung dan anak-anak mereka. Untuk pembinaan dalam bidang kesehatan ini dibentuk suatu kordinasi untuk menyelidiki dan memberi laporan tentang kesehatan di kampung-kampung dan jumlah kematian bayi. Hak dan kedudukan wanita dalam dewan rakyat pun sangat diperhatikan. Untuk itu dipelajari kemungkinan-kemungkinan agar wanita mempunyai hak pilih dan dipilih.

Perkembangan dunia pers selalu menjadi perhatian pergerakan wanita. Surat kabar-surat kabar yang sudah diterbitkan baik oleh perkumpulan-perkumpulan di daerah maupun oleh PPPI/PPII seperti surat kabar *Istri* di Jakarta, *Sunting Melayu* di Bukittinggi, dan *Suara Perempuan* di Padang. Pada mulanya surat kabar-surat kabar tersebut menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Melayu, tetapi setelah beberapa kali kongres wanita, diharuskan mempergunakan Bahasa Indonesia. Hal ini dimaksudkan dan ditegaskan untuk mendukung kebulatan tekad

bangsa sebagaimana yang telah ditetapkan dalam "Sumpah Pemuda" 1928. Isyarat ini disebarkan kepada semua perkumpulan wanita, sehingga pada tahun 1930 Wanita Aisyiah mengadakan kursus Bahasa Indonesia di berbagai cabang perkumpulan sampai ke daerah-daerah, demikian pula perkumpulan-perkumpulan lainnya.([19])

Kordinasi dan hubungan antaranggota perkumpulan selalu ditingkatkan, bahkan hubungan dengan organisasi wanita di luar negeri pun terjalin. Hal ini dibuktikan dengan pengiriman perutusan ke *All Asian Women Conference* yang diadakan di Lahore (India) pada bulan Januari 1931. Pada kesempatan ini, Ny. Sunaryati Sukemi dan Ny. RA. Rukmini Santoso berkenan menghadiri konferensi wanita internasional tersebut.

Kegiatan-kegiatan lain yang tidak kurang pentingnya di antaranya ialah partisipasi Wanita Taman Siswa dalam membantu Ki Hadjar Dewantara (Taman Siswa) menghadapi berlakunya *Wilde Schoolen Ordonantie* atau Undang-undang Sekolah Liar pada tahun 1932. Taman Siswa yang ketika itu dianggap sebagai sekolah-sekolah liar dilarang Pemerintah Belanda. Wanita Taman Siswa ikut menghadapinya dengan cara mereka. Apabila ada guru-guru yang dirumahkan, Wanita Taman Siswa pun maju menggantikannya untuk mengajar di depan kelas. Apabila tenaga pengganti ini pun diberhentikan, maka akan maju lagi yang lain untuk mengganti teman yang diberhentikan itu. Begitu juga ketika sekolah-sekolah Taman Siswa ditutup, maka wanita-wanita Taman Siswa ikut mendatangi rumah-rumah murid untuk mengajar mereka. Bila ada seorang guru yang ditangkap karena aksinya yang terang-terangan, maka Wanita Taman Siswa akan maju sebagai sukarelawati di samping sukarelawan anggota Taman Siswa menggantikan tugas guru yang ditangkap dan dipenjarakan itu. Kegiatan ini merupakan perjuangan yang amat gigih untuk mempertahankan pendidikan Nasional yang dirintis oleh Ki Hadjar dan Nyi Hadjar Dewantara.([20]) Perkumpulan Istri Sedar yang didirikan di Bandung pada tahun 1930 berjuang dengan gigih membantu Taman Siswa. Hal itu

terbukti dengan salah satu programnya yakni menyokong suatu pendidikan Nasional yang berdasarkan kebutuhan kaum melarat dan atas dasar-dasar kemerdekaan serta percaya kepada diri sendiri.(21)

Demikian besarnya perjuangan melawan Undang-undang sekolah Liar dalam Sejarah Pergerakan Bangsa dapat dilihat dari adanya bantuan dari segenap organisasi perjuangan Nasional, Pers Nasional dan tidak ketinggalan organisasi wanita. Akhirnya Pemerintah Belanda kewalahan juga menghadapi "gerilya pendidikan" yang ternyata didukung oleh segenap partai dan segenap organisasi pergerakan kebangsaan, karena dengan ditutupnya sekolah-sekolah Taman Siswa, ternyata guru-guru Taman Siswa menjadi semakin bertambah banyak jumlahnya dan sekolah-sekolah pun menjadi semakin luas tersebar di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, di setiap rumah guru maupun di rumah-rumah para sukarelawan dan sukarelawati guru. Berkat perjuangan yang kompak dan gigih serta dengan dukungan dari segenap organisasi perjuangan rakyat, pendidikan Nasional Taman Siswa mencapai kemenangan. Untuk pertama kali dalam sejarah penjajahan Belanda di Indonesia sejak kedatangan mereka pada tahun 1956, Pemerintah Belanda mencabut undang-undang yang sudah diundangkan sebagai akibat perlawanan rakyat.(22)

Persatuan dan kesatuan perjuangan wanita semakin kokoh dan berkualitas. Muncul berbagai perkumpulan atau organisasi baru mewarnai gerak dan langkah perjuangan wanita. Misalnya organisasi Istri Sedar; satu-satunya organisasi wanita yang berhaluan politik, sejak tahun 1930 memberi warna bagi panorama gerak perjuangan wanita Indonesia. Dalam tahun 1932 Istri Sedar dengan tegas menetapkan program tentang pendidikan Nasional yang sekaligus membawanya menghadapi undang-undang sekolah liar yang diberlakukan Pemerintah Hindia Belanda. Demikian juga cita-cita dan tujuan yang dirumuskan di dalam anggaran dasarnya yang antara lain berbunyi, "Perhimpoenan Istri Sedar Menoedjoe pada kesadaran perempoean dan

pada deradjat dan penghargaan sama. antara perempoean dan laki-laki di dalam pergaoelan hidoep di Indonesia. Oentoek mentjapai toejoean ini diroemoeskan sebagai dasar: (1) kenasionalan yang sedalam-dalamnya, (2) kepertjayaan pada diri sendiri, (3) kerakyatan yang seloeas-loeasnya, dan (4) kenetralan terhadap (tidak memihak) pada agama apa poen.([23])

Tujuan yang agak keras itu menimbulkan berbagai tanggapan terhadap kehadirannya. Oleh gerakan-gerakan yang progresif, dasar cita-cita dan tujuan Istri Sedar itu dapat dipahami sepenuhnya, tetapi dari pihak yang berpikiran feodal dan statis, Istri Sedar mendapat serangan dan kritikan, apalagi dari Pemerintah Hindia Belanda. Pengawasan terhadap organisasi wanita ini mendapat perhatian ekstra dibanding organisasi wanita lainnya dan Pemuda Indonesia. Pengurus Istri Sedar yang berkedudukan di Jakarta mendapat pengawasan ketat dari Kepolisian Tinggi; demikian pula sekolah-sekolah yang dikelola Istri Sedar di Bandung yang dinamakan "Institut Tjahya" terpaksa diserahkan kepada Taman Siswa cabang Bandung yang dipimpin Ki Tjokrosoekarto.([24])

Di masa pemerintahan Hindia Belanda ini kegiatan-kegiatan wanita terutama dalam bidang pendidikan dan pengajaran dapat dikatakan mengalami peningkatan. Kedudukan sosial pun mengalami perbaikan, demikian pula dalam bidang politik telah dapat digeluti. Pada tahun 1938 beberapa wanita Indonesia ikut serta dalam pemilihan keanggotaan Dewan-Dewan Kotapraja. Hal ini merupakan realisasi atau tindak lanjut dari perjuangan pergerakan wanita tentang hak pilih yang sudah dimulai sejak tahun 1930 dalam Kongres PPII di Surabaya. Pada tahun 1938 Pemerintah Hindia Belanda telah memberikan hak untuk dipilih (*passief kiesrecht*) kepada wanita Indonesia, sehingga empat orang wanita telah terpilih sebagai anggota Dewan Kota yaitu: Ny. Emma Puradiredja di Bandung, Ny. S. Sunaryo Mangunpuspito di Semarang, Nn. Sri Umiyati di Cirebon, dan Ny. Sitti Sundari Sudirman di Surabaya.

Suatu gagasan untuk membina kerjasama di antara partai-partai politik dalam bentuk federasi timbul kembali pada tahun 1938 ini. Pada 21 Mei 1939 di dalam rapat pendirian "konsentrasi nasional" oleh Parindra berhasil didirikan suatu organisasi yang merupakan kerjasama partai-partai politik dan seluruh organisasi pergerakan nasional, yang diberi nama Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Organisasi yang dipimpin MH. Thamrin ini di dalam anggaran dasarnya menerangkan bahwa GAPI berdasarkan kepada : (1) hak untuk menentukan diri sendiri, (2) persatuan nasional dari seluruh bangsa Indonesia dan seterusnya, dan (3) persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia.([25])

Di dalam konferensi pertama GAPI, 4 Juli 1939, dibicarakan tentang aksi GAPI dengan semboyan dan tuntutan, "Indonesia Berparlemen". Di sini GAPI belum menuntut kemerdekaan penuh melainkan suatu parlemen yang berdasarkan kepada sendi-sendi demokrasi, namun aksi dan semboyan GAPI ini didukung dengan sungguh-sungguh oleh organisasi-organisasi pergerakan wanita di samping juga organisasi pergerakan lainnya.

Menghadapi tuntutan bangsa Indonesia ini Pemerintah Hindia Belanda membentuk Komisi Visman untuk menyelidiki keinginan-keinginan bangsa Indonesia mengenai perubahan-perubahan ketatanegaraan. Sehubungan dengan itu pada permulaan tahun 1941 Komisi Visman telah meminta datang dua orang wanita Indonesia yakni Ny. Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito yang menuntut "Indonesia Berparlemen" dan Ny. Sri Mangunsarkoro yang menuntut "Indonesia Merdeka". Setelah Kongres Perempuan ke-4 di Semarang tahun 1941, salah satu keputusan kongresnya adalah menganjurkan kepada anggota Dewan Rakyat (*Volksraad*) untuk mengusulkan agar Bahasa Indonesia dimasukkan sebagai mata pelajaran tetap pada sekolah-sekolah menengah. Di samping itu kongres juga menganjurkan kepada anggota-anggotanya agar membantu sepenuhnya aksi GAPI, "Indonesia Berparlemen", dan ikut menolak ordo-

nansi wajib militer terbatas bagi bangsa Indonesia.([26])

Di akhir masa pemerintahan Hindia Belanda ini kegiatan pergerakan wanita boleh dikatakan hampir mencapai hasil yang maksimal yaitu dengan mengirimkan mosi kepada pemerintah dan telegram kepada Dewan Rakyat yang isinya menuntut hak untuk memilih Anggota Dewan Kota dan Dewan Rakyat diberikan juga kepada wanita Indonesia (*acktief kiesrecht*) Mengenai hal ini direncanakan akan dibahas dalam Kongres Perempuan ke-4 di Surabaya yang kemudian ternyata tidak dapat terlaksana karena pendudukan tentara Jepang.

CATATAN BAB II

(1) Kowani, *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita*, Balai Pustaka, Jakarta 1986, hal. 44.

(2) *Ibid*

(3) *Ibid*

(4) *Ibid.*

(5) Kartini, *Habis Gelap Terbitlah Terang*, dalam Siti Sumandari Suroto, *Kartini Sebuah Biografi*, Gunung Agung Jakarta, 1982, hal. 321.

(6) F. de Hoan dalam Rochiati Wiriatmodjo, *Dewi Sartika*, Depdikbud, Proyek IDSN, tahun 1983, hal. 91.

(7) *Ibid*, hal 93.

(8) *Ibid*, hal 94–95.

(9) Drs. Suratmin dan Suhatno BA, *Biografi Nasional, Tokoh Kongres Perempuan Indonesia Yang Pertama* (naskah belum diterbitkan), DEPdikbud, IDSN, 1990/1991, hal. 13.

(10) *Ibid*, hal. 308.

(11) MPB Manus, *Maria Walanda Maramis*, Depdikbud, Proyek IDSN' tahun 1982, hal. 23.

(12) Drs. Suratmin dan Suhatno BA, *Biografi Nasional, Tokoh-tokoh Kongres Perempuan Indonesia yang Pertama,* (naskah belum diterbitkan), Depdikbud, IDSN, 1990/1991, hal. 14.

(13) *Ibid,* hal. 15, dan Congres numer, Congres Perempuan Indonesia Pertama, 22–25 Desember 1928, Mataram, hal. 14.

(14) *Ibid,* hal. 30 dan Congres numer, hal. 41–42.

(15) *Ibid,* hal. 11 – 107.

(16) Kowani, *Loc-cit,* hal. 59.

(17) B.S. Dewantara, *Nyi Hadjar Dewantara,* Gunung Agung Jakarta, 1984, hal. 115.

(18) *Ibid.*

(19) Kowani, *Loc-cit,* hal . . . . .

(20) B.S. Dewantara, *op–cit,* hal. 116.

(21) Sartono Kartodirdjo cs, *Sejarah Nasional Indonesia V,* Depdikbud, Proyek IDSN, Jakarta, 1982/1983, hal. 247.

(22) B.S. Dewantara, *Loc-cit,* hal. 117.

(23) *Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi,* Buku V, Sinar Harapan, Jakarta, 1985, hal. 207.

(24) *Ibid,* hal. 204.

(25) Sartono Kartodirdjo, *op-cit,* hal. 236.

(26) Kowani, *Loc-cit,* hal. 82.

BAB III
PERAN DAN AKTIVITAS WANITA DI MASA JEPANG

3.1 Mengikuti Kegiatan Badan Resmi Jepang

Dalam rangka perwujudan suatu imperium. Asia Timur Raya, rejim Jepang sebagai pemilik gagasan tersebut, selain menggelar kekuatan beserta mesin perangnya, juga merasa perlu mendapatkan dukungan serta simpati dari bangsa-bangsa di Asia, khususnya Asia Tenggara guna meraih ambisinya. Untuk mewujudkan impiannya itu, juru bicaranya secara diplomatis mengumandangkan semboyan-semboyan manis dengan memberikan harapan-harapan, "Kemakmuran Asia Timur Raya", "Asia untuk Asia", dan "Indonesia untuk Bangsa Indonesia". Untuk lebih meyakinkan bangsa Indonesia, Jepang menyatakan dirinya sebagai saudara tua yang datang untuk melepaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajah Belanda. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui juru bicaranya, dengan gaya yang memikat terus menyebarkan rasa anti Barat, teristimewa ditujukan terhadap pemuda-pemuda.([1]) Namun demikian setelah angkatan bersenjatanya memperoleh kemenangan-kemenangan dan berhasil mengukuhkan pemerintahnya, ternyata saudara tua tersebut memiliki daya paksa yang keras dalam memobilisasi dan mengatur sistem pemerintahan sehingga dalam tempo yang relatif singkat runtuh dalam segala tatanan hidup yang ada. Berdirinya pemerintahan Jepang

agaknya bukan saja menghalangi setiap gerak, tetapi telah mematikan semua gerakan baik itu politik maupun gerakan sosial yang telah tumbuh pada masa akhir kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda. Di atas reruntuhan itu kemudian Pemerintah Jepang membangun badan lembaga-lembaga yang selaras dengan kepentingan fasis Jepang.

Pada bulan April 1942 Badan Propaganda Jepang mendirikan gerakan Tiga A yang berpusat di Jakarta dan pimpinannya adalah Mr. Rd. Syamsuddin, mantan anggota *Volksraad* dari fraksi Parindra. Gerakan ini mencanangkan semboyan "Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia".([2]) Dalam bulan Maret 1943 gerakan ini dibubarkan dan sebagai gantinya didirikan Putera (Pusat Tenaga Rakyat), yang pimpinannya lebih dikenal adalah Empat Serangkai yang terdiri atas Soekarno, Moh. Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan KH. Mas Mansyur. Karena dicurigai oleh pihak Jepang, maka gerakan ini kemudian dibubarkan dan bersamaan dengan itu didirikan gerakan *Jawa Hokokai* (Kebaktian Rakyat Jawa).([13])

Sejalan dengan taktik bongkar-pasang yang dilakukan oleh Jepang, maka berdirinya perkumpulan wanita juga merupakan bagian dari gerakan-gerakan yang telah dibentuk Jepang. Pada masa itu kaum wanita tidak banyak memperoleh kesempatan seperti pada masa sebelumnya, karena setiap gerak selalu mendapat pengawasan yang ketat dari *Kempetai* Jepang. Untuk mengikuti kehendak Pemerinah Jepang, maka ketika didirikan Gerakan Tiga A dibentuk pula Gerakan Istri Tiga A dengan pimpinan Ny. Artinah Syamsuddin. Gerakan tersebut dilengkapi dengan bagian puteri, yang dinamakan Barisan Puteri Asia Raya. Dengan dibentuknya Putera pada bulan Maret 1943, dibentuk pula Barisan Pekerjaan Perempuan Putera, bagian dari wanitanya.

Pada tingkat pusat gerakan tersebut dipimpin oleh Ny. Sunaryati, Ny. Sukanti Suryocondro, Ny. Burdah Yusupadi, dan Ny. SK. Trimurti.([4]) Gerakan ini didirikan di kota-kota seluruh Jawa. Kegiatannya ditujukan terutama untuk penye-

lenggaraan Pemberantasan Buta Huruf, memintal benang, dan mengerjakan rupa-rupa pekerjaan tangan. Di samping itu kegiatan ini juga berperan sebagai juru penerang, terutama untuk ibu-ibu di desa. Pesan yang disampaikan adalah agar supaya ibu-ibu bersedia menyerahkan putra-putranya untuk menjadi anggota *keibodan* (pembantu polisi) dan *seinendan* (barisan pemuda).

Di samping gerakan ini, Pemerintah Jepang mendirikan *Fujinkai* (organisasi wanita) yang kedudukannya khusus menampung segala bentuk kegiatan kaum wanita. *Fujinkai* didirikan mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat bawah dan namanya sesuai dengan tingkat dan tempat kedudukannya, seperti *ken* untuk tingkat kabupaten dan *si* untuk kota. Adapun pemimpin dari perkumpulan ini adalah istri-istri dari *kenco* (bupati. Dengan demikian *Fujinkai* merupakan suatu keharusan bagi ibu-ibu atau istri para pamong praja mulai dari tingkat atas sampai ke wilayah kecamatan-kecamatan. Anggota-anggotanya diwajibkan menggerakkan tenaga-tenaga kaum wanita di tempat masing-masing, sedangkan yang turut menjadi anggota adalah anak gadis yang berumur 15 tahun ke atas. Keanggotaan *Fujinkai* juga terbuka bagi orang-orang asing.([5])

Pemerintah Jepang mengharapkan berdirinya *Fujinkai* dapat membina hubungan erat antara kaum laki-laki dengan kaum wanita. Tugas pokok yang dilakukan *Fujinkai* untuk membantu kegiatan garis depan adalah dengan memperkuat kegiatan garis belakang. Bantuan yang diberikan untuk memperkuat garis depan dilakukan berupa latihan kepalangmerahan, penggunaan senjata, penyelenggaraan dapur umum, dan mengerjakan keperluan serdadu seperti memasang kancing baju, membuat kaos kaki, dan keperluan lainnya, sedangkan untuk memperkuat pertahanan garis belakang yakni melakukan perluasan tanaman bahan makanan dan meningkatkan populasi ternak sebagai bahan makanan utama. Untuk memenuhi kebutuhan bahan pakaian, kaum wanita diharapkan lebih berperan dalam menggalakkan penanaman kapas.([6]) Dengan cara tersebut,

selain diharapkan kaum wanita dapat menyumbangkan tenaga untuk kepentingan masyarakat juga diharapkan sebagai wahana untuk menimba pengalaman serta sarana latihan dalam berorganisasi.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka pada 3 November 1943, di Jakarta didirikan *Tokobetsu si Fujinkai*, dengan pimpinan Ny. RA. Abdurrachman. Perkumpulan ini kemudian dilengkapi dengan didirikannya Barisan Puteri dengan pimpinan Siti Dahlia dan Nursyamsu sebagai wakilnya. Adapun para pembantunya antara lain adalah Setiati, Malidar (Ny. Hadiwiyono), dan Paramita Abdurrachman.

Dalam rangka pencetakan kader, Barisan Puteri melaksanakan latihan-latihan yang bertempat di dekat Bioskop Megaria Jakarta. Kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap yang setiap tahapnya diikuti oleh 50 orang. Para pesertanya terdiri atas gadis-gadis sebagai wakil dari kecamatan-kecamatan seluruh Jakarta dan terbuka juga kesempatan bagi gadis dari luar Jakarta. Pelajaran yang diberikan adalah latihan kemiliteran, kepalangmerahan atau PPPK, masak-memasak, dan dapur umum. Selain itu diberikan pula berbagai keterampilan seperti memintal benang dan menenun serta diberi kesempatan untuk berlatih deklamasi dan menyanyi untuk mengisi acara siaran radio.

Untuk meningkatkan pengetahuan setiap dua hari sekali kepada para peserta diberikan ceramah oleh tokoh-tokoh nasional, di antaranya ialah Muhammad Hatta dan Sutan Syahrir.*(7)* Dengan ceramah-ceramah ini diharapkan dapat meperkaya pengetahuan terutama dalam mempersiapkan diri untuk menuju kemerdekaan.

Pada 1 Maret 1944 Putera dibubarkan, karena Jepang mensinyalir bahwa gerakan ini telah dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh pemuda untuk menghimpun serta membangkitkan semangat kebangsaan Indonesia. Sehubungan dengan itu maka Putera dilebur menjadi *Jawa Hokokai* (Himpunan Kebaktian

Rakyat Jawa). Pembentukan *Jawa Hokokai* berdasar kepada *Hokoseishan* (semangat kebaktian) yang mendorong tiga dasar, yakni : *missi* semangat mengorbankan diri sendiri dengan melupakan kepentingan sendiri, *shinwa* mempererat persahabatan), dan *jissen* melaksanakan sesuatu dengan bukti nyata).

Bertumpu pada dasar tersebut, Pemerintah Jepang berupaya menggabungkan semua kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. Hal ini berarti Pemerintah Jepang akan melibatkan seluruh lapisan masyarakat ke dalam perangkap peperangan, karena hal ini merupakan kewajiban untuk berbakti guna mencapai kemenangan Perang Asia Timur Raya yang digambarkan sebagai perang suci.

Sejalan dengan pesan yang disampaikan oleh *Jawa Hokokai,* maka seluruh *Fujinkai* yang berdiri di daerah dilebur menjadi *Jawa Hokokai Fujinkai,* sebagai bagian wanita, dengan susunan pengurus pusat sebagai berikut :

K e t u a	:	Ny. Sunaryo Mangunpuspito
Wakil Ketua I	:	Ny. Ios Wiraatmaja
Wakil Ketua II	:	Ny. Maskun
Penulis I	:	Ny. Maryati Adnan
Penulis II	:	Ny. Rosnah Jamin
Anggota	:	Ny. Siti Maryam
Pembantu	:	Ny. Sutarman
		Ny. S.R. Tambunan
		Ny. Artinah Syamsuddin.
		Ny. Hafni Abu Hanifah.

Pada masa awal terbentuknya, *Jawa Hokokai Fujinkai* termasuk dalam bagian urusan pendidikan, tetapi dalam bulan Januari 1945 badan tersebut kemudian berdiri sendiri dengan nama *Jawa Hokokai Fujinkai Jimukyoku.* Bagian pemudinya disebut *Joshi Seinenkai* dengan pimpinannya Siti Maryono, Ny. Maryati Adnan, dan Ny. Rosnah Jamin.

Berhubung barisan tersebut dipersiapkan di belakang garis perang, maka kepada barisan ini diberikan latihan ke-

palangmerahan, baris-berbaris, mempergunakan senjata, latihan bahaya udara, mengunjungi rumah sakit, mengadakan dapur umum, dapur keliling, dapur tetap, dan dapur pembelaan.

Usaha-usaha yang dilakukan *Fujinkai* antara lain :

(1) mengobarkan semangat cinta tanah air dan bangsa di kalangan wanita dan menanamkan nasionalisme,
(2) menganjurkan agar suka berkorban dan rela menderita untuk tanah air dan bangsa,
(3) menyiapkan tenaga untuk ikut serta di belakang garis penerangan,
(4) menganjurkan hidup teratur dan berhemat,
(5) memperbanyak hasil bumi dengan menanami semua tanah yang terluang dengan tanaman penghasil bahan makanan dan pakaian antara lain ubi, ubi kayu, jarak, kapas dan lain-lain,
(6) menghidupkan pekerjaan tangan dan industri di rumah antara lain memintal benang, membuat kaos kaki,
(7) mengadakan latihan-latihan yang diperlukan, dan
(8) menghidupkan pekerjaan untuk memberantas penganggur-an.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan *Fujinkai* pada hakekatnya tidaklah terlepas dari garis-garis yang telah ditentukan seperti tertuang dalam *Jawa Hokokai* (Himpunan Kebaktian Jawa) yang mencakup pelaksanaan segala sesuatu dengan nyata da ikhlas untuk menyumbangkan segenap tenaga berdasarkan semangat persaudaraan antara segala bangsa, memperkokoh pembelaan tanah air.([10]) Berpegang pada patokan tersebut *Fujinkai* Jawa Barat melangsungkan musyawarah dari 16 -- 18 Maret 1944 di Bandung dengan susunan panitia pelaksana sebagai berikut :

Ketua	:	Ny. Ema Somanegara
Wakil Ketua I	:	Ny. K. Atmadinata
Wakil Ketua II	:	Ny. Sunaryo
Penulis	:	Ny. Supardan

Bendahara : Ny. H. Purwana
Anggota : Ny. E. Puradireja, Ny. Dj. Maskun, Ny. Slamet, Ny. Basuni, Ny. Wiramihardja, Ny. Sunado, Ny. Adiwinata, Ny.Cokro, Nn. Siti M. dan Nn. Hadijah, sedangkan alamat sekretariat berkedudukan di jalan Grote Pustweg Oost 53 (Jalan Asia Afrika) Bandung.

Dalam rapat pertemuan persiapannya, wakil masyarakat Cina Ny. Thio angkat bicara dengan mengatakan, bahwa bangsa Cina adalah bangsa Asia seperti halnya bangsa Indonesia; karena itu ia mengharapkan, demi menjaga keutuhan persatuan maka ia mengajukan beberapa pemikiran untuk dapat menjadi perhatian bersama, antara lain :

(a) jika ada kesalahan, jangan dilimpahkan pada bangsanya, tetapi hendaknya kepada orangnya,
(b) hendaknya jangan mencela bangsa atau golongan lain, dan
(c) jangan merasa bahwa bangsanya lebih tinggi dari bangsa lain.

Sejalan dengan irama tersebut, Ny. E. Somanegara yang terpilih sebagai ketua juga menyampaikan beberapa butir pemikiran yang dapat menjadi bahan pertimbangan kaum wanita; di antaranya adalah :

(a) dalam bidang ekonomi, ikut serta menggiatkan untuk menabung, mengawasi masalah pertokoan dan koperasi di Tonarigumi (Rukun Tetangga), memberantas perdagangan gelap,
(b) dalam bidang sosial, ikut serta mengurus kesehatan rakyat dan ikut serta menjaga bahaya udara dan kebersihan rakyat,
(c) dalam bidang kebudayaan, turut serta menjaga sopan-santun dan kesusilaan, dan
(d) dalam bidang pendidikan, agar kaum ibu menjadi pendidik yang baik bagi putra-putrinya agar kelak berguna bagi nusa dan bangsa.

Akhirnya musyawarah *Fujinkai* Jawa Barat telah menghasilkan keputusan antara lain :

(a) menyesuaikan penghidupan dengan masa perang.
(b) menunjang *fonds* kemerdekaan dan perang dengan jalan mewajibkan anggota *Fujinkai* menambah sokongan sebesar satu sen setiap bulan dan mengadakan usaha untuk kesejahteraan. ([11])

Pada pertengahan tahun 1944 kekuatan Angkatan Perang Jepang mulai terdesak oleh kekuatan Sekutu. Tempat-tempat yang letaknya strategis jatuh satu-persatu ke tangan kekuatan Amerika Serikat, sehingga seluruh garis pertahanan yang terentang di wilayah Pasifik terancam dan hubungan komunikasi serta jalur transportasi dengan daerah-daerah selatan menjadi terganggu.

Sehubungan dengan keadaan tersebut Pemerintah Jepang selain dari badan-badan yang telah ada seperti *keibodan* (pembantu polisi), *seinendan* (barisan pemuda), *heiho* (pembantu prajurit), dan PETA (Pembela Tanah Air) juga merasa perlu membentuk Barisan Srikandi dan badan ini merupakan bagian dari *Fujinkai*. Anggota-anggotanya terdiri atas wanita-wanita yang berumur antara 15--20 tahun dan belum bersuami. Pasukan ini benar-benar dipersiapkan sebagai pasukan tempur, karena mereka telah dibekali dengan berbagai pengetahuan tentang kemiliteran, sehingga pasukan tersebut sudah memiliki keterampilan dan kemampuan yang cukup.([12])

Sementara itu situasi dan kondisi semakin kritis, moral rakyat semakin merosot, produksi perang macet dan kebutuhan pendukung pun semakin menipis. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak Pemerintah Jepang mengeluarkan perintah untuk melakukan latihan secara massal. Seluruh penduduk dianjurkan untuk melakukan perlawanan terhadap musuh (Sekutu) dengan mempergunakan senjata yang ada seperti tombak, bambu runcing, dan alat-alat lainnya. Tiap-tiap rumah diperintahkan untuk dibuatkan lubang perlindungan terhadap serangan udara dan pada malam hari lampu-lampu dipadamkan.

Siapa yang tidak mengindahkan perintah tersebut akan mendapat hukuman.

Pada masa-masa akhir pemerintah pendudukan Jepang, keadaan diwarnai kesusahan, sandang-pangan sukar diperoleh, *romusha* tersebar di mana-mana dan konon sampai ke Asia daratan sebagai tenaga kerja paksa serta tiba gilirannya menjadi manusia yang disia-siakan karena tidak lagi mendapat perhatian yang layak; karena itu banyak di antara mereka yang hilang begitu saja. Untuk pulang ke kampung halaman tidak ada daya untuk mendukungnya.

Untuk mengimbangi keadaan yang makin genting tersebut kaum wanita yang berpayung *Fujinkai* turun ke lapangan untuk memberikan penerangan-penerangan terhadap ibu-ibu di wilayah Tonarigumi (Rukun Tetangga) dalam usaha melakukan gerakan penghematan. Selain itu juga turut mengerjakan sawah dan ladang seperti mengetam padi, menanam kapas dan jarak. ([13])

Guna meringankan beban penderitaan *romusha*, *Fujinkai* secara suka-rela bergerak untuk mengumpulkan pakaian-pakaian bekas yang kemudian diberikan kepada *romusha*. Karena sulitnya mendapatkan bahan pakaian, maka untuk keperluan tersebut terpaksa membuat pakaian dari bahan karung goni seperti dilakukan oleh *Fujinkai* Surabaya sekedar untuk meringankan penderitaan *romusha* yang sedang bekerja di pantai selatan Pulau Jawa.([14]) Fujinkai di luar Jawa pun tidak ketinggalan memberikan darmabaktinya terhadap bangsanya yang menderita, teristimewa bagi *romusha-romusha* yang diangkut oleh Jepang dari Jawa. Ketika mereka ini ditelantarkan hidupnya, maka dengan penuh kasih-sayang ditampung oleh *Fujinkai*. Untuk memenuhi kebutuhan sebelum dapat dipulangkan ke kampung halamannya, maka pimpinan *Fujinkai* setempat menugaskan anggota-anggotanya untuk mengumpulkan pakaian dan makanan.([15]) Bagi *romusha* yang sakit, *Fujinkai* mengusahakan pengobatan sampai sembuh.([16])

3.2 Beberapa Reaksi Kaum Wanita terhadap Jepang

Kehadiran Jepang dengan segala perangkatnya serta kebijakan yang dijalankan, agaknya telah menimpa dan menghancurkan seluruh sendi kehidupan rakyat Indonesia. Semboyan-semboyan manis menarik yang dikumandangkan juru bicaranya hanya merupakan taktik yang licik guna melapangkan jalan dalam rangka perluasan wilayah kekuasannya di Asia bagian timur.

Pengukuhan pemerintah pendudukan Jepang dengan segala perlengkapannya merupakan suatu pertanda adanya perubahan status bagi Tanah Air Indonesia, dalam arti nyata, bahwa Tanah Air Indonesia yang telah lama diinjak-injak kolonial Belanda, kini sudah beralih tangan pemiliknya menjadi hak Jepang, karena pada gilirannya rakyat Indonesia baik yang duduk sebagai pegawai maupun yang bukan harus tunduk di bawah kibaran *hinomaru*, bendera Jepang, dan terpaksa melagukan *Kimigayo*, lagu kebangsaan Jepang. Ini merupakan upacara resmi yang dilakukan setiap pagi, ketika matahari terbit. Di kantor-kantor maupun sekolah-sekolah diwajibkan melakukan *sekerei*, yaitu memberikan hormat dengan membungkukkan badan menghadap ke timur ke arah matahari terbit.([17])

Merasakan adanya perubahan tatanan serta garis kebijaksanaan keras yang diterapkan oleh Pemerintah Jepang, kaum wanita, teristimewa kalangan ibu-ibu yang terdidik dan telah terjun dalam gerakan sosial atau politik sebelum kedatangan Jepang, dengan tegas menolak ajakan-ajakan Jepang untuk bekerjasama. Menurut mereka, hal itu merupakan paksaan tersendiri untuk membantu kepentingan Jepang. Penolakan kerja untuk kepentingan Jepang telah disampaikan oleh Ny. Suyatin Kartowiyono, seorang pencetus gagasan Kongres Perempuan Indonesia Pertama, di dalam suatu pertemuan resmi dengan pihak Jepang. Ini terjadi ketika Shimitzu, kepala bagian propaganda Jepang, di dalam suatu rapat pertemuan menyampaikan ajakannya kepada seluruh kaum wanita Indonesia untuk

membentuk suatu perkumpulan wanita yang dinamakan *Fujinkai* (Perkumpulan Wanita). Ajakan tersebut spontan ditolak oleh Nyi Suyatin Kartowiyono dan bersamaan dengan itu ia mengusulkan kepada rapat agar menghidupkan dan memperluas gerak kehidupan perkumpulan-perkumpulan · wanita yang telah ada. Ia menyatakan, bahwa gerakan-gerakan wanita telah mengakar dan menyebar luas hampir ke seluruh penjuru tanah air. Ia juga mengharapkan agar pemerintah memberikan dukungan atas kelangsungan hidup bagi perkumpulan-per kumpulan wanita yang telah berdiri itu. Menanggapi usul yang bersemangat itu, pimpinan rapat menyampaikan secarik kertas kepada Ny. Suyatin yang isinya mengingatkan, "Hati-hati Kempetai" tetapi teguran tersebut tidak mematahkan semangat Ny. Suyatin untuk tetap memperjuangkan kesinambungan perkumpulan wanita. Karena sikapnya dalam rapat itu, maka beberapa waktu kemudian ia dapat berita, bahwa ia telah tercatat dalam daftar hitam *Kempetai.* (18)

Berkaitan dengan maksud berdirinya *Fujinkai,* maka telah menjadi bahan pertanyaan yang serius dari Ny. Badilah Zuber, pemimpin Aisyiah yang berkedudukan di Yogyakarta, mengenai kedudukan *Fujinkai* yang akan dibentuk itu. Pertanyaan itu dilontarkannya ketika perkumpulan-perkumpulan wanita di Yogyakarta dikumpulkan di suatu tempat dan Mr. Jodi selalu pemrakarsa menyampaikan gagasannya supaya wanita melakukan kerjasama di dalam *Fujinkai* dengan membentuk wanita menanyakan, "Bagaimana gambaran Wanita Indonesia sebenarnya?", tetapi Mr. Jodi sendiri tidak mengerti, sehingga ia pun tidak dapat menjelaskannya.([19])

Dengan berdirinya *Fujinkai,* maka Aisyiah sebagai organisasi wanita yang telah mengakar, oleh penguasa Jepang dilarang melakukan gerakan sosial. Yang berwenang mengurus usaha sosial hanyalah *Fujinkai.* Sejalan dengan ketentuan tersebut maka pemeliharaan anak yatim perempuan oleh Aisyiah terpaksa diserahkan kepada Muhammadiyah (Majelis PKO), tetapi di dalam pelaksanaannya, Ny. Badilah Zuber beserta

anggota-anggota Aisyiah lainnya secara diam-diam terus melakukan kegiatannya. Mereka terus aktif mengumpulkan infak dan sedekah berupa uang atau beras dan juga mengumpulkan pakaian-pakaian bekas dari dermawan yang kemudian dibagikan kepada fakir miskin ataupun yang berhak menerimanya.

Salah satu kegiatan yang cukup menonjol yang dilakukan Ny. Badilah bersama kawan-kawan pada masa pendudukan Jepang ialah keikutsertaannya menjadi anggota panitia penyelenggara perayaan *Nuzul Qur'an.* Perayaan tersebut diselenggarakan atas prakarsa guru-guru sekolah menengah negeri Yogyakarta, sedangkan Ny. Badilah selain pimpinan Aisyiah juga profesinya sebagai guru SMA, karenanya secara otomatis ia terlibat aktif dalam kegiatan tersebut. Di samping itu ia dipercayakan juga menjadi salah seorang penceramah, khususnya ceramah yang bernafaskan keagamaan. Dalam hal ini, kemampuan olah kata Ny. Badilah tidak diragukan lagi, bahkan itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Sebagai muslimah yang baik, sudah menjadi tugas dan kewajiban baginya untuk menyampaikan ceramah agama sekalipun cuma satu ayat, karena itu ruang geraknya bukan hanya di wilayah Yogyakarta tetapi juga ke daerah lain. Sebagai pendakwah, selain harus memeras otak untuk menyampaikan pidatonya, terkadang ia harus mengejar waktu karena tempatnya jauh. Ia juga pernah dikecewakan oleh Pemerintah Jepang. Pernah pada suatu ketika, saat ia akan naik mimbar, datang perintah dari penguasa Jepang bahwa ia tidak boleh menyampaikan pidatonya. Menurut badan sensor Jepang, isi pidato Ny. Badilah Zuber dikatakan menghina Pemerintah Jepang, padahal uraian yang akan disampaikan Ny. Badilah Zuber adalah perbandingan antara Nabi Muhammad saw. dengan Napoleon Bonaparte dari Perancis.

Berpegang pada pengalaman tersebut, maka dalam acara peringatan *Nuzul Qur'an* itu Ny. Badilah Zuber sedikit mengubah sikap dengan memilih tema yang uraiannya selaras dengan perayaan tersebut dan tidak menyinggung keberadaan

Jepang, walaupun secara prinsip tetap tegas menolak Jepang dengan segala embel-embelnya, karena itu untuk menyemarakkan peringatan *Nuzul Qur'an* yang setiap tahun kedatangannya selalu dinanti dan disambut oleh umat Islam di mana pun, Ny. Badilah memilihkan pidatonya yang berjudul "Kesempurnaan Islam".([20]) Untuk lebih menyemarakkan perayaan tersebut, diselenggarakan pula pameran di gedung Museum Sonobudoyo Yogyakarta. Pameran yang lebih dominan dipamerkan adalah dipanjangnya kitab suci *Al-Qur'an* dari ukuran terkecil sampai ukuran yang terbesar. Salah satu karya unik yang turut dipamerkan adalah *Surat Yasin* yang dituliskan lengkap pada kulit telur karya Siraj Dahlan. Selain itu dipajang pula sebuah lukisan yang menggambarkan Nabi Yusuf duduk di atas timba dikerumuni oleh serombongan kafilah pada sebuah sumur di padang pasir. Konon pameran ini merupakan pameran terbesar ketika itu dan merupakan pameran yang pertama sekali diselenggarakan oleh umat Islam di Indonesia, khususnya di Kota Yogyakarta. Para pengunjung datang berlimpah bukan saja dari daerah Yogyakarta tetapi juga dari luar Yogyakarta.

Sementara itu pada masa-masa awal kehadiran Jepang, kaum wanita Yogyakarta yang sudah lama melaksanakan perayaan tersebut sebagai tradisi tahun itu bermaksud melaksanakan perayaan Hari Kartini sebagai penghormatan atas jasa-jasanya. Seperti diketahui bahwa Kartini telah berjasa membukakan tabir kegelapan kaum wanita dan telah meletakkan tonggak awal bagi kaum wanita untuk berpacu dalam mengejar Kemajuan.

Berhubung dengan larangan berkumpul dari pihak Jepang selaku penguasa dan adanya keengganan dari beberapa perkumpulan wanita di Yogyakarta, maka Ny. Arini Suwandi bersama Ny. Ruswa merasa terpanggil hatinya untuk menjadi motor penggerak. Dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada berbagai pihak dan kalangan yang mendukung, pada akhirnya diperoleh kata sepakat untuk melaksanakan perayaan tersebut, karena itu kemudian dibentuklah panitia pelaksana

dengan Ny. Arini Suwandi sebagai ketua dan Ny. Ruswa sebagai sekretaris.

Untuk memperoleh izin dari penguasa Jepang, Ny. Arini Suwandi beserta lima orang anggotanya menghadap pembesar Jepang yang berkedudukan di Gedung Agung Yogyakarta. Dengan mengajukan berbagai alasan yang meyakinkan, penguasa Jepang tersebut memberikan izin tetapi dengan syarat, di antaranya : ([21])

(1) tidak boleh melagukan Indonesia Raya,
(2) tidak boleh mengibarkan bendera Merah Putih,
(3) peserta tidak boleh lebih dari 500 orang,
(4) waktu pelaksanaan tidak boleh lewat pukul 22.00, dan
(5) untuk keamanan diadakan penjagaan oleh tentara Jepang.

Perayaan diselenggarakan di Gedung CHTH atau Gedung KONI Yogyakarta. Perayaan dapat berlangsung dengan semarak meskipun ada beberapa persyaratan yang harus dilanggar seperti jumlah pengunjung yang melebihi ketentuan. Hal ini dapat diatasi karena panitia dapat mengatur sedemikian rupa sehingga dapat ditampung pengunjung sebanyak-banyaknya. Caranya ialah dengan memilah-milah undangan sesuai dan pengunjung biasa. Peserta yang mendapat undangan resmi masuk melalui pintu depan, sedangkan yang tidak memperoleh undangan resmi masuk melalui pintu samping yang sudah dibuka lebar dan terbebas dari pengawasan tentara Jepang yang menjaga. Karena banyaknya peserta yang datang, maka banyak pengunjung yang terpaksa duduk di lantai. Acara perayaan ini berjalan tertib dan teratur hingga berakhir dengan kepuasan.

Mengenai *Fujinkai*, Yogyakarta, pada mulanya Ny. Arini Suwandi menolak duduk menjadi pimpinan, tetapi karena adanya tekanan dari pihak Jepang dan dengan pertimbangan lainnya, maka ia pun menerimanya. Dari celah-celah aktivitasnya di *Fujinkai* Ny. Arini sebagai pimpinan juga memanfaatkan kesempatan untuk melakukan dialog dalam pertemuan-pertemuan terutama dengan tokoh-tokoh wanita, sebab seperti

diketahui, setelah kehadiran Jepang, hubungan di antara mereka bagaikan putus antara satu dengan yang lain. Dengan mempergunakan baju *Fujinkai*, terbuka banyak kesempatan bagi ibu-ibu atau tokoh-tokoh pemimpin perkumpulan wanita untuk saling tukar informasi. Hal ini merupakan suatu keberuntungan dari rencana yang telah digariskan sebelumnya, karena dengan kedok *Fujinkai* ibu-ibu dari Keraton Yogyakarta di antaranya BRA. Hadikusumo, GK. Ratu Dewi, dan GERA. Harjono ikut duduk berdampingan dengan ibu-ibu lainnya. Dalam susunan masyarakat Jawa, status ibu-ibu tersebut biasanya diletakkan pada lapisan teratas, tetapi dalam *Fujinkai* ibu-ibu tersebut tidak canggung dalam melaksanakan semua kegiatan. Mereka berbaur dengan ibu-ibu yang lain memasang kancing baju serdadu Jepang, menisik, dan melakukan pekerjaan lainnya. Di samping itu ada satu pengharapan dan itu sudah menjadi keyakinan bersama, yaitu bahwa Jepang tidak akan lama berkuasa di Indonesia, hanya seumur jagung seperti ramalan Joyoboyo.([22])

Sementara itu Ny. Srikanah Kumpul, ketua *Fujinkai* Medan, Sumatera Utara (ketika itu Sumatera Timur) merasakan bahwa kehadiran Jepang telah menyusahkan rakyat. Kebutuhan pangan dan sandang semakin sukar didapat. Pemerintah Jepang telah menentukan jatah beras hanya 180 gram bagi setiap penduduk, padahal untuk memperolehnya sangat sukar. Untuk mendapatkan beras ibu-ibu terpaksa menukar dengan baju, celana, sepatu, dan harta milik lainnya, sehingga pada masa itu dikenal istilah "makan baju". Demikianlah keadaan yang terjadi di kota-kota di seluruh Indonesia ketika itu.

Pada suatu ketika peredaran beras menghilang dari pasaran Kota Medan. Sebagai gantinya, rakyat terpaksa makan ketela dan kedelai. Untuk menenteramkan kegelisahan rakyat, pemerintah setempat (Jepang) memaksa Ny. Srikanah Kumpul selaku ketua *Fujinkai* untuk menyampaikan penjelasan kepada rakyat banyak melalui corong radio Jepang. Untuk kepentingan tersebut, Ny. Srikanah Kumpul berbicara di depan corong de-

ngan mengatakan, bahwa dalam jangka waktu dekat beras akan melimpah memenuhi pasar-pasar di seluruh Kota Medan. Setelah berjalan beberapa hari ternyata apa yang dikatakan Jepang melalui Ny. Srikanah cuma omong kosong karena telah sekian lamanya rakyat menunggu, sebutir beras pun belum ada yang tercecer di pasar.

Sementara itu pihak penguasa Jepang meminta lagi kesediaan Ny. Srikanah Kumpul untuk menyampaikan berita tentang kedatangan beras. Sebenarnya Ny. Srikanah agak keberatan, tetapi karena adanya tekanan dari pihak penguasa Jepang, maka ia terpaksa melakukannya lagi. Karena perasaan jengkel terhadap sikap Jepang, maka ketika ia berada di depan corong bukan menyampaikan bahwa beras akan datang, melainkan ia dengan lantang mengatakan, "saudara-saudara jangan percaya jika besok beras sudah ada, saya berbicara di depan corong radio ini karena dipaksa". Akibatnya ia diseret dan diinterogasi oleh *Kempetai*. Selanjutnya ia dihukum jemur berjam-jam lamanya di panas terik.([23]) Dalam hal ini agaknya ia kurang teliti untuk bertindak, karena sewaktu menyampaikan siaran itu dikiranya orang-orang Jepang yang bertugas di tempat itu belum bisa berbahasa Indonesia. Ternyata dugaannya meleset, karena petugas penjaga keamanan siaran tersebut ada yang sudah dapat berbahasa Indonesia, sehingga ia menanggung akibatnya.

Bagi ibu-ibu atau kaum wanita yang telah terjun dalam gerakan politik, kehadiran Jepang tidaklah berbeda dengan penjajah Belanda. Kedua bangsa asing ini datang untuk memperbudak rakyat Indonesia, karena itu mereka tidak tergoda dengan propaganda-propaganda serta janji-janji Jepang. Bersamaan dengan itu mereka juga terus mengencangkan aktivitasnya, seperti yang dilakukan oleh Ny. Siti Larang Sosrokardono, seorang aktivis Serikat Islam (SI) yang berdomisili di Surabaya. Ia datang dari keluarga bangsawan Surakarta. Ayahnya, R. Joyopranoto, termasuk salah seorang anggota tertua Serikat Islam. Mengikuti jejak ayahnya, Ny. Siti Larang Sosrokardono bersama suaminya, Sosrokardono, turut mengusung gagasan

yang telah digariskan oleh SI; karena itu dalam memperjuangkan nasib bangsanya, suami istri ini silih berganti masuk penjara, seperti juga dialami oleh Sayuti Melik dengan istrinya, SK. Trimurti. Meskipun demikian mereka itu tidak mengubah sikap, tetap berpegang teguh pada prinsip.

Ketika pendudukan Jepang, Ny. Siti Larang Sosrokardono sedikit menggeser sikap untuk melanjutkan perjuangan. Berdirinya badan-badan yang dibentuk oleh Pemerintah Jepang telah dimanfaatkan oleh Ny. Siti Larang Sosrokardono untuk menyalurkan gagasannya yang vital. Ketika didirikan PETA (Pembela Tanah Air), ia mendorong supaya pemuda-pemuda sebanyak mungkin turut mendaftarkan diri untuk masuk menjadi anggotanya. Menurut perhitungannya, dengan mengikuti kesempatan tersebut para pemuda akan memperoleh keterampilan dan keahlian yang profesional dalam bidang kemiliteran. Dengan demikian apabila telah merdeka, negara sudah mempunyai tentara yang tangguh; negara yang merdeka memerlukan kekuatan tangguh, berdisiplin tinggi, bermental baja, percaya diri, sabar dan tawakal sebagai tenaga pembela tanah air.([24]) Ia berkeyakinan bahwa suatu ketika bangsa Indonesia pasti merdeka.

Sejalan dengan prinsipnya yang teguh itu, Ny. Siti Larang Sosrokardono terus aktif melakukan pertemuan-pertemuan rahasia guna menemukan jalan yang baik dalam meneruskan perjuangan, terutama dalam menghadapi tirani facis Jepang. Sayangnya, sebelum perjuangannya genap setahun, geraknya itu tercium oleh *Kempetai*. Bersamaan dengan itu ia ditangkap, kemudian dijebloskan ke Penjara Kalisosok Surabaya.

Di dalam penjara ia mendapat perlakuan yang sebenarnya tidak pantas dilakukan terhadap seorang wanita. Kedua kakinya diikat seperti sapi yang hendak dipotong kemudian ditarik seperti menaikkan sangkar burung perkutut setinggi dua meter. Sesampainya di puncak lalu diturunkan dengan kecepatan tinggi seperti jatuh. Tindakan *Kempetai* ini dilakukan berulang kali sehingga ia kehilangan kesadarannya. Setelah sadar, ia diintegorasi lagi, tetapi tetap tutup mulut sehingga rahasianya tidak terbongkar.

Melihat perlakuan seperti itu seorang petugas berkebangsaan Indonesia dan bersimpati menganjurkan agar Ny. Siti Larang mengakui saja semua kesalahannya. Dengan demikian diharapkan siksaan yang dilakukan oleh *Kempetai* segera berakhir dan selanjutnya tinggal menjalani hukuman di dalam penjara. Saran yang baik itu dengan spontan ditolak oleh Ny. Siti Larang Sosrokardono sambil meledakkan kemarahannya. Ia bersumpah, lebih baik mati dalam siksaan dari pada mengakui kesalahan pada facis Jepang itu.([25])

Kepahitan hidup di dalam penjara yang dirasakan sejak masa pemerintahan Hindia Belanda hingga masa pemerintahan Jepang, tidaklah memadamkan cita-cita kebangsaan yang diusungnya, bahkan semangat juangnya semakin tinggi menyala. Hal tersebut terlihat ketika ia dibebaskan dari penjara oleh Jepang. Ia langsung mencari teman-teman seperjuangannya untuk memperoleh informasi tentang langkah-langkah dalam perjuangan. Selama dalam tahanan ia sudah kehilangan jejak kawan-kawan dan sudah sampai di mana proses perjuangannya. Berhubung sulitnya menemukan teman-teman, maka ia berangkat ke Kediri dengan tujuan selain menyegarkan pikiran dari kelelahan juga terselip keinginan untuk dapat berjumpa dengan kawan-kawan lama, kawan seperjuangan. Di Kediri beruntunglah ia bertemu dengan Bambang Suparto di Desa Mojoroto Kediri. Kesempatan yang dicari-cari itu mereka memanfaatkan untuk berdialog, teristimewa tentang situasi politik dan perkembangan perang Jepang–Sekutu. Dari dialog itu pada akhirnya mereka terlibat serius dalam pembicaraan yang menyangkut tentang kemerdekaan.

Mengikuti gerak Ny. Siti Larang Sosrokardono, aktivis Serikat Islam, menentang kehadiran Jepang merupakan sosok wanita Indonesia. Gerak demikian juga ditunjukkan oleh SK. Trimurti sejak kekuasaan Belanda sampai Jepang bertahta di Indonesia. Ia datang dari keluarga yang berkedudukan. Ayahnya seorang asisten wedana (camat) sehingga ia memperoleh banyak kesempatan dalam pendidikan. Dengan berbekal

pendidikannya itu ia terpanggil menjadi wartawati. Tulisan-tulisannya yang tajam banyak dimuat di koran-koran *Sinar Selatan, Penyebar Semangat,* dan mingguan *Pesat;* karena itu ia bersama suaminya, Sayuti Melik, secara bergantian sering keluar-masuk penjara pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Kehadiran Jepang sedikit memberi celah untuk menghirup udara segar, karena ia bersama-sama tokoh pergerakan nasional yang ditempatkan penguasa Belanda ketika itu di Garut dibebaskan oleh Jepang. Dengan kebaikan teman-teman seperjuangannya, ia dapat kembali berkumpul dengan keluarganya di Semarang. Sambil mengikuti situasi yang diciptakan Jepang, ia mencurahkan perhatian pada keluarganya dan selanjutnya mencoba menata kehidupan baru dalam alam baru, yaitu situasi rancangan Jepang.

Sejalan dengan profesinya, sebagai jurnalis, ia bersama suaminya, Sayuti Melik, menerbitkan sebuah surat kabar bernama *Pesat.* Harian ini sebenarnya merupakan kelanjutan hidup dari majalah *Pesat,* tetapi karena situasinya memungkinkan, maka majalah tersebut dijadikan surat kabar harian.

Pemerintah Jepang yang fasistis tidak membenarkan terbitnya surat kabar swasta serta kegiatan lain yang dianggap membahayakan. Semua kegiatan diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah. Sehubungan dengan itu, maka surat kabar *Pesat* yang diasuh oleh Sayuti Melik bersama istrinya, SK. Trimurti, tidak terkecuali ditutup paksa. Sebagai gantinya, Pemerintah Jepang menerbitkan sebuah harian bernama *Sinar Baru.* Untuk menarik simpati rakyat, Sayuti Melik bersama istrinya, SK. Trimurti, ditunjuk menjadi pengaruh surat kabar tersebut. Kepercayaan Jepang tidak berlangsung lama, karena Sayuti Melik kemudian ditangkap *Kempetai* dan dijebloskan ke dalam penjara dengan tuduhan, ia telah melakukan gerakan di bawah tanah untuk menentang kekuasaan Jepang. Beberapa waktu kemudian istrinya, SK. Trimurti, pun ditangkap *Kempetai* dengan tuduhan yang sama. Ia dituduh telah melakukan gerakan

yang menentang kekuasaan Jepang. Ia kemudian dimasukkan ke dalam Penjara Jurnatan Semarang.

Dalam pembelaan di depan Nadeci, petugas *Kempetai,* SK. Trimurti dengan tegas menyatakan, bahwa ia tidak akan memusuhi Jepang dan tidak juga memusuhi Belanda, yang ia musuhi adalah sikap menjajah dari bangsa itu. Selanjutnya ia menambahkan, "Jikalau Jepang datang ke Indonesia untuk persaudaraan akan disambut gembira, akan tetapi kalau kedatangannya untuk menjajah akan dilawan".([26])

Pada tahun 1943, atas perjuangan Ir. Soekarno, SK. Trimurti dapat dibebaskan dan untuk keamanan ia pindah menetap di Jakarta. Pada periode 1943--1944 ia tidak banyak terlibat, karena ia bekerja dengan PUTERA dan bagian penyelidik yang ada kaitannya dengan pelaksanaan pembagian beras, pakaian serta kebutuhan sehari-hari lainnya. Pemimpin bagian ini adalah Mr. Sumanang, sedangkan anggota-anggotanya di antaranya ialah Kartosuwirjo, SK. Trimurti, dan Sayuti Melik. Mereka berkantor di Jalan Sunda (Jalan HOS. Tjokroaminoto sekarang), Jakarta.

Demikianlah kegiatan-kegiatan kaum wanita dalam masa pemerintahan Jepang. Meskipun ada tekanan dan bahkan ancaman, tetapi dari celah-celah itu kaum wanita masih dapat menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk kepentingan bangsanya. Pada umumnya kaum wanita menolak keberadaan Jepang karena telah melakukan pemaksaan, pemerasan, dan tindakan kekerasan lain sehingga mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia.

Berbagai cara telah dilakukan oleh kaum wanita untuk menentang Jepang, baik secara halus maupun dengan reaksi yang cukup berani. Kehadiran serta sikap Jepang membuat ibu-ibu sengaja melepas profesinya, karena ia enggan duduk pada lembaga atau instansi pemerintah, seperti yang dilakukan oleh Ny. Sri Muryan Abednego. Ia berhenti mengajar dan tidak mau belajar bahasa Jepang serta tidak mau menulis huruf

Katakana. Ia kemudian masuk menjadi anggota *Fujinkai*. Tindakan serupa juga dilakukan oleh Ny. Mantria Hotasoit. Ia sangat membenci Jepang dan karenanya ia tidak mau belajar bahasa Jepang. Ia juga menolak masuk *Fujinkai* karena *Fujinkai* adalah organisasi wanita bikinan Jepang yang dikendalikan oleh Jepang. Penolakan semua itu karena praktek-praktek busuk yang dilakukan Jepang terhadap rakyat Indonesia. ([27])

Reaksi lainnya dilakukan oleh Ny. Johanna Masdani. Ia tidak senang terhadap Jepang dan karenanya ia menolak bekerjasama dengan Jepang yang murah janji tetapi tidak ada buktinya, bahkan mereka bertindak sewenang-wenang. Meskipun dengan demikian pada mulanya ia giat belajar bahasa Jepang, tetapi karena suatu kejadian, ia berhenti belajar bahasa Jepang. Hal ini terjadi ketika pulang les bahasa Jepang, ia tidak melihat serdadu Jepang berdiri di belakang pohon di Cikini Raya. Karena tidak memberi hormat kepada serdadu tersebut, maka Ny. Johanna Masdani dipanggil dan ditempeleng.([22])

Lain lagi yang dilakukan oleh Ny. Syamsidar Murdiono yang menjabat sebagai kepala sekolah Chikusa. Ia bersama kawan-kawan sengaja tidak memberikan penghormatan terhadap seorang wanita Jepang di sekolah tersebut. Hal ini sengaja dilakukan karena wanita Jepang itu berlagak seperti penilik sekolah dan angkuh. Peristiwa ini kemudian dilaporkan kepada atasan. Akibatnya Ny. Syamsidar bersama kawan-kawan mendapat hukuman disuruh mencangkul di lapangan Kemayoran, tetapi karena Ny. Syamsidar protes, maka mereka disuruh membersihkan semua ruangan Garnizun Barelaan (Berlan). Mereka kemudian protes lagi, minta bekerja yang sesuai dengan harkat wanita, sehingga keluarlah perintah untuk membuat lencana serdadu Jepang. ([29])

Pada masa-masa akhir pendudukan Jepang, Gedung Menteng 31 kedudukannya menjadi lebih penting, karena selain pemuda, di tempat ini sering keluar-masuk para tokoh dan pemikir bangsa. Lebih penting lagi karena di sini dilatih kader-kader bangsa yang datang dari seluruh Jawa, termasuk kaum wanita.

Untuk mengorganisasi ceramah-ceramah tentang demokrasi, ketatanegaraan, dan pengetahuan lainnya, Karni dan kawan-kawan menunjuk Lasmidjah Hardi sebagai penanggungjawabnya, sedangkan penceramahnya adalah Bung Hatta, Haji Agus Salim, dan tokoh-tokoh lainnya. ([30])

Bertolak dari pengalaman pahit yang dilalui, pendudukan Jepang dalam beberapa hal juga telah memberikan pengaruh positif terhadap rakyat Indonesia. Cinta tanah air, bersedia mengorbankan jiwa dan raga, dan rasa harga diri tampak besar pada rakyat Indonesia. Maksud Jepang untuk bekerjasama dengan pimpinan nasional Indonesia dengan maksud menanamkan kekuasaannya, telah dimanfaatkan oleh para pemimpin tersebut untuk mempersiapkan kemerdekaan dengan menggunakan sarana-sarana Jepang yang telah ada. Wanita organisasi *Fujinkai* dan Barisan Puteri pun terus melanjutkan perjuangannya mencapai kemerdekaan.

CATATAN BAB III

(1) *Sejarah Nasional Indonesia VI,* Editor, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, Jakarta, Penerbit Proyek IDSN, Depdikbud, 1983, hal. 27.

(2) Ahmad Subardjo Djoyohadikusumo, *Kesadaran Nasional, Sebuah Otobiografi,* Jakarta, Penerbit Gunung Agung, 1978, hal. 239–242.

(3) Benda, Harry J., *Bulan Sabit Dan Matahari Terbit, Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang.* Terjemahan Daniel Dhakidae, cetakan pertama, Jakarta, Penerbit Pustaka Jaya, 1980, hal. 187 – 188.

(4) Kongres Wanita Indonesia, *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia,* cetakan kedua, Jakarta, Penerbit Balai Pustaka, 1986, hal. 84–85.

(5) Ibid, hal. 85.

(6) Manus, MPB., *Peranan Wanita Indonesia Di Masa Perang Kemerdekaan* (1945–1950), Jakarta, Proyek IDSN, Depdikbud, 1985, hal. 85.

(7) Kongres Wanita Indonesia, op-cid, hal. 85.

(8) Manus, MPB, op-cid, hal. 20.

(9) Kongres Wanita Indonesia, op-cid, hal. 86.

(10) Manus, MPB, op-cid, hal. 21.

(11) Ibid, hal. 22.

(12) Ibid, hal. 23.

(13) *Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi, Kumpulan Pengalaman dan Pemikiran,* Buku V, cetakan pertama, Jakarta, Penerbit Sinar Harapan, 1985, hal. 121.

(14) Ibid, hal. 121–122.

(15) *Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi, Kumpulan Pengalaman dan Pemikiran,* Buku IV, cetakan pertama, penyusun Lasmidjah Hardi, Jakarta, Penerbit Sinar Harapan, 1984, hal. 137.

(16) *Bunga Rampai Soempah Pemoeda 50 Tahun,* dihimpun oleh Yayasan cetakan pertama, Jakarta, Penerbit Balai Pustaka, 1978, hal. 163.

(17) *Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi, Kumpulan Pengalaman dan Pemikiran,* Buku II, penyusun Lasmidjah Hardi, Jakarta, Penerbit Sinar Harapan, 1982, hal. 178.

(18) *Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi, Kumpulan Pengalaman dan Pemikiran,* Buku I, penyusun Lasmidjah Hardi, cetakan kedua, Jakarta, Penerbit Sinar Harapan, 1984, hal. 248, lihat Ny. Suyatin Kartowiyono, *Perkembangan Pergerakan Wanita Indonesia,* cetakan III, Jakarta, Penerbit Yayasan Idayu 1982, hal. 7.

(19) Sumbangsihku ....., Buku IV, op-cid, hal. 106.

(20) Ibid, hal. 107.

(21) Sumbangsihku ....., Buku V, op-cid, hal. 38.

(22) Ibid, hal. 39–40.

(23) Sumbangsihku ....., Buku II, op-cid, hal. 200.

(24) Sumbangsihku ....., Buku IV, op-cid, hal. 24.

(25) Ibid, hal. 27.

(26) Soebagiyo IN. *SK. Trimurti Wanita Pengabdi Bangsa*, cetakan pertama, Jakarta, Penerbit PT Gunung Agung, 1982, hal. 60.

(27) Sumbangsihku ....., Buku I, op-cid, hal. 161, lihat Sumbangsihku ....., Buku II, op-cid, hal. 180.

(28) Sumbangsihku ....., Buku I, Ibid, hal. 122.

(29) *Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi, Kumpulan Pengalaman dan Pemikiran*, Buku V, penyusun Lasmidjah Hardi, cetakan pertama, Jakarta, Penerbit Sinar Harapan, 1983, hal. 169–170.

(30) Sumpah Pemuda, op-cid, hal. 139.

BAB IV
PERANAN WANITA DALAM MENYAMBUT KEMERDEKAAN

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan oleh Soekarno – Hatta atas nama bangsa Indonesia, merupakan pertanda runtuhnya tali pengikat yang mengikat tanah air bangsa Indonesia dan merupakan pertanda titik awal berdirinya Negara Republik Indonesia merdeka dan berdaulat. Pekik kemerdekaan itu menyebar secara beranting ke seluruh penjuru tanah air dan disambut dengan suka-cita oleh seluruh lapisan masyarakat. Bersamaan dengan itu rakyat yang mendambakan kemerdekaan tersebut bangkit dan bergerak menyatukan langkah untuk membela dan menyelamatkannya dari segala kemungkinan yang akan merongrong.

Sejalan dengan pekik kemerdekaan tersebut, kaum wanita sebagai totalitas bengsa spontan memberikan sambutan dan dukungan dengan menyumbangkan baik tenaga maupun pikiran. Keterlibatan kaum wanita dalam peristiwa yang bersejarah ini bukanlah suatu sikap perbuatan yang kebetulan saja,, dalam arti karena terbawa oleh suami, melainkan jauh sebelumnya, kaum wanita telah menunjukkan geraknya sebagai eksponen bangsa dalam perjuangan. Karena itu tepatlah kiranya seperti dikatakan oleh Ny. Suyatin Kartowiyono, "Pergerakan Wanita Indonesia merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari Pergerakan Nasional".([1])

Dalam proses menuju dan menyambut proklamasi kemerdekaan yang keramat itu, kaum wanita telah memberikan tenaga dan pikiran secara maksimal seperti yang telah diperankan oleh Ny. Fatmawati Soekarno, Ny. Maria Ulfah Santoso, Ny. Suwarni Pringgodigdo, Ny. Artinah Syamsuddin, Ny. Sri Riyadi Sujatman, Ny. Suyatin Kartowiyono, Ny. Erna Sutoto Djajadiningrat, Ny. Sukarjo Wiriyopranoto, Ny. Sukesih Budiardjo, Ny. Roem, Zuster Annie Senduk, dan ibu-ibu lainnya dari seluruh pelosok tanah air. Mereka itu adalah wakil-wakil kaum wanita yang telah turut berjuang mengatasi kesulitan yang dihadapi bangsa Indonesia pada masa itu.

Dalam proses menuju detik-detik proklamasi kemerdekaan, Ny. Fatmawati Soekarno telah mempersembahkan sebuah karya yang bernilai sejarah. Ia telah berhasil menjahit bendera Merah Putih dengan tangannya sendiri. Meskipun bentuk dan ukurannya tidak standar, tetapi tidaklah mengurangi kehikmatan upacara Proklamasi 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur Nomor 56. Berkibarnya bendera Merah Putih tersebut telah membakar semangat rakyat Indonesia untuk mempertahankannya.

Dalam menyambut Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 seluruh lapisan masyarakat, laki-perempuan, tua-muda datang memenuhi halaman rumah kediaman Soekarno di Pegangsaan Timur Nomor 56. Semua berjalan dengan tertib dan teratur hingga upacara selesai. Karena belum ada jadwal secara rinci, maka ketika tiba giliran acara menaikkan bendera Merah Putih, tiba-tiba seseorang telah menyeletuk, "mBakyu Tri menaikkan bendera". Trimurti yang merasa tidak pantas melakukan hal tersebut, kemudian menyerahkan kepada S. Suhud untuk melaksanakannya.([2]) S. Suhud kemudian menaikkan bendera tersebut perlahan-lahan dengan dibantu oleh Latief Hendraningrat. Bersamaan dengan itu, tanpa komando menggemalah lagu Indonesia Raya.

Pekik kemerdekaan yang diiringi kibaran bendera Merah Putih semakin membakar semangat kaum wanita, terutama remaja putri yang tampil dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Sehubungan dengan itu *Fujinkai* buatan Jepang dibubarkan oleh ketuanya, Ny. Siti Sukaptinah. Selanjutnya ia menganjurkan supaya segera didirikan organisasi wanita di seluruh kota dan kabupaten. Sejalan dengan anjuran tersebut, terbentuklah Persatuan Wanita Indonesia (Perwari), dengan kegiatan utamanya : (1) mengucapkan salam dengan pekik Merdeka, (2) mengibarkan bendera Merah Putih, (3) memakai lencana Merah Putih, dan (4) membantu Komite Nasional Indonesia (KNI) di daerah.

Bersamaan dengan kegiatan yang digariskan Persatuan Wanita Indonesia (Perwari), Ny. Sri Riyadi Sujatman mendapat tugas dari suaminya, Sujatman, kepala Jawatan Kereta Api Manggarai untuk menjahit bendera Merah Putih yang akan dikibarkan di seluruh stasiun kereta api wilayah eksploitasi barat. Hal ini dilakukan karena pada 3 September 1945 Sujatman beserta staf dan buruhnya didukung oleh pemuda-pemuda telah berhasil mengambilalih kekuasaan jawatan kereta api dari kekuasaan Jepang. Selanjutnya dibentuklah Dewan Pimpinan Jawatan Kereta Api Republik Indonesia.([4]) Untuk menyatakan bahwa hal tersebut menjadi milik Pemerintah Indonesia, Sujatman membawa pulang dua blok kain; satu blok berwarna merah dan satu blok lagi berwarna putih untuk dijadikan bendera Merah Putih. Adapun ukuran yang diperlukan, sebagian berukuran 2 x 3 m dan sebagian lagi berukuran 1 x 5 m. Karena waktunya sangat mendesak, maka untuk mengerjakan bendera tersebut Ny. Sri Riyadi menggunakan tiga mesin Jahit, dan mengerahkan keluarganya supaya keesokan harinya dapat dibawa dan dibagi-bagikan terutama ke stasiun-stasiun wilayah eksploitasi barat, sedangkan bendera berukuran besar dikibarkan di Stasiun Pusat Jakarta Kota.([5])

Ketika bendera Merah Putih telah berkibar di Stasiun Kota, terjadi insiden dengan pihak Jepang, karena pihak Jepang me-

nurunkannya sedangkan pihak pemuda telah menyatakan miliknya dan tetap mempertahankannya untuk terus berkibar. Pemuda-pemuda yang telah membentuk Dewan Pimpinan Jawatan Kereta Api tidak hanya mengibarkan bendera Merah-Putih, tetapi juga menguasai Kereta Api. Segala urusan yang menyangkut kemerdekaan, penyebarluasannya, dan hal-hal lain dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat.

Setelah proklamasi kemerdekaan, bendera Merah Putih dengan megahnya berkibar di angkasa sebagai tanda kejayaan bangsa. Jika ada yang berani menurunkan, seluruh rakyat akan membela dan ini seperti dilakukan oleh Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro dengan tegas mempertahankan bendera Merah Putih ketika hendak diturunkan oleh Jepang. Sikap demikian agaknya telah memberi ilham kepada Ibu Sud alias Ny. Bintang Sudibyo yang kemudian menuangkannya dalam lagu perjuangan berjudul, "Berkibarlah Benderaku", yang isinya sebagai berikut: (6)

Berkibarlah benderaku
Lambang suci gagah perwira
Di seluruh pantai Indonesia
Kau tetap pujaan bangsa
Siapa berani menurunkan engkau
Serentak rakyatmu membela.
Sang Merah Putih yang kucinta
Berkibarlah slama-lamanya.

Patut dicatat, bahwa pengibaran sang saka Merah Putih di Semarang telah dilakukan oleh Ny. Siti Rujiyah Pujo Utomo, tokoh Aisyiah yang pernah aktif di dalam *Fujinkai*. Ia telah mengibarkan bendera Merah Putih di rumahnya sejak 15 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena berita yang dibawa oleh seorang kurir, bahwa kemerdekaan akan diproklamasikan pada 15 Agustus 1945. Sehubungan dengan berita tersebut, pada 14 Agustus 1945 sore hari anggota Putera dikumpulkan di rumah Wongsonegoro guna membicarakan pembagian tugas dalam

rangka penyambutan kemerdekaan yang telah lama dinantikan. Berhubung bulan puasa, maka mereka berbuka puasa dan makan sahur bersama di rumah Wongsonegoro.

Malam itu hingga waktu makan sahur tiba, ibu-ibu sibuk membuat bendera Merah Putih, lencana, dan perlengkapan lainnya. Untuk keperluan tersebut, Ny. Siti Rujiah Pujo Utomo membuat bendera Merah Putih ukuran besar dan membuat lencana merah putih. Dengan bahan yang telah tersedia, Ny. Siti Rujiah Pujo Utomo mengerahkan tenaga seisi rumahnya, termasuk adik, kemenakan, anak serta pembantu rumah tangganya untuk mengerjakan pembuatan lencana tersebut. Ibu-ibu yang lain ditugaskan untuk membuat *sliger* merah putih dan juga membuat bendera Merah Putih dari bahan kertas dengan berbagai ukuran. Demikianlah, ibu-ibu sibuk mempersiapkan keperluan untuk menyambut proklamasi kemerdekaan pada malam itu hingga makan sahur. Sesudah itu barulah mereka pulang ke rumah masing-masing. Pagi harinya tanpa melakukan konsultasi dengan anggota lainnya, Ny. Siti Rujiah Pujo Utomo menulis dengan tinta Cina, bahwa Proklamasi Kemerdekaan dilaksanakan pada 15 Agustus 1945. Bersamaan dengan itu, langsung dikibarkanlah bendera Merah Putih dan tidak pernah diturunkannya sampai tiba Proklamasi yang sebenarnya pada 17 Agustus 1945.([7])

Sementara itu untuk lebih meningkatkan keterlibatan kaum wanita, Presiden Soekarno yang telah mengangkat Ny. Suwarni Pringgodigdo dengan 11 orang anggota lainnya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung pada 25 September 1945 ([8]), mendapat tugas untuk menyediakan tenaga-tenaga pemimpin wanita yang sanggup bekerja di Jakarta dan sanggup melaksanakan tugas di tempat lain, khususnya untuk menyelenggarakan dapur umum dan melakukan tugas sosial lainnya. Untuk memenuhi permintaan tersebut, pada bulan Oktober 1945 terbentuklah Wanita Negara Indonesia (Wani). Pimpinannya adalah Ny. Suwarni Pringgodigdo dan Ny. Erna Sutoto Jayadiningrat. Adapun tokoh yang turut menentukan langkah dan

keputusan tersebut di antaranya adalah Ny. Maria Ulfah Santoso, Ny. Suwarni Pringgodigdo, Ny. Sukesih Budiarjo, Ny. Sukarjo Wiryopranoto, dan Ny. Sutoto Jayadiningrat. Dalam kesempatan itu juga, tugas penyelenggaraan dapur umum diserahkan kepada Ny. Erna Sutoto Jayadiningrat, sedangkan kegiatan jahit-menjahit (konveksi) diserahkan kepada Ny. Sukarjo Wiryopranoto dibantu oleh seluruh pergerakan wanita di Jakarta.

Kegiatan dapur umum Wani yang penyelenggaraannya telah dipercayakan kepada Ny. Erna Sutoto Jayadiningrat merupakan tuntutan dan semakin meningkatnya suhu perjuangan. Para pemuda tampak sudah tidak sabar lagi. Mereka itu ingin segera bertindak, sedangkan pihak Jepang yang sudah kalah kelihatan masih tetap menggelar mesin perangnya dan serdadu-serdadunya siaga penuh di pos-posnya, sehingga timbul benturan-benturan pengertian antara pemuda dengan pihak Jepang. Di satu pihak, adanya tuntutan nyata seperti yang sudah dituangkan dalam naskah proklamasi kemerdekaan, *"Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya"*. Di pihak lain, meskipun Jepang sudah kalah, tetapi mendapat wewenang untuk menjaga keamanan hingga datangnya pasukan Sekutu. Berpegang pada hal itulah kiranya maka pihak Jepang menghalang-halangi dan bahkan melarang pengibaran bendera Merah Putih.

Menghadapi situasi demikian, para pemuda mengharapkan adanya suatu perintah yang tegas untuk bertindak. Untuk menunjang kelancaran perjuangan, Ny. Erna Sutoto Jayadiningrat telah menyediakan rumahnya yang terletak di Jalan Mampang Nomor 47 Jakarta untuk dijadikan sebagai pusat kegiatan dapur umum. Untuk melancarkan semua kegiatan dapur umum ini ini ia mengerahkan semua keluarganya untuk bekerja. Bahan keperluan seperti beras diperoleh dari H. Darip, orang kaya dari Klender, ikan mendapat kiriman dari dermawan Pasar Ikan dan Tanjung Priok, dan buah-buahan diperoleh kiriman

dari Pasar Minggu. Begitu juga untuk kelancaran arus bahan-bahan keperluan dapur umum ini, Gubernur Suwiryo menyediakan sebuah truk dengan sopirnya, Kusnadi, sehingga semua bahan yang diperlukan dapat diangkut cepat; karena itu dapur umum ini tidak mengalami kekurangan persediaan bahan pangan.([9])

Dapur umum ini selain melayani kepentingan para pejuang juga menyediakan makanan bagi pegawai negeri yang tidak dapat pulang karena adanya halangan. Pada masa itu hampir segala kegiatan sering terhenti, seluruh rakyat selalu dalam keadaan siaga, pedagang-pedagang dan toko-toko sering tutup, bahkan tidak buka berhari-hari lamanya, begitu juga jalur lalulintas sering terhalang. Dalam keadaan demikian dapur umum yang dikelola oleh Wani bukan saja bertugas menyediakan makanan para pejuang, tetapi berperan juga sebagai pos Republik.([10])

Demikianlah kedudukan rumah Ny. Erna Sutoto Jayadiningrat pada masa itu. Hal ini sejalan dengan meningkatnya volume kegiatan pemuda, sehingga yang semula sebagai dapur umum dalam arti menyediakan makan minum, tetapi kemudian kedudukannya lebih menjadi penting karena rumah ini menjadi pusat pertukaran informasi dan dari tempat ini pula pemuda-pemuda mengatur taktik serta mengatur langkah dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Dengan kedatangan Sekutu yang membonceng Nica sejak bulan Oktober 1945, markas dapur umum yang ditandai dengan kibaran megah Sang Merah Putih telah mengundang perhatian serius. Tentara Belanda yang bertopeng Sekutu itu terus-menerus mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan markas dapur umum tersebut. Karena mencurigai aktivitas penduduknya yang sibuk, tentara Belanda dengan kekerasan menggeledah dapur umum itu, tetapi Ny. Erna Sutoto Jayadiningrat sebagai penanggungjawab seluruh aktivitas dapur umum ini tidaklah gentar akan ancaman Belanda. Ia terus melakukan kegiatan tersebut dan karena itulah agaknya markas dapur umum ini menjadi sa-

saran peluru tentara Belanda. Bersamaan itu pula bendera Merah Putih yang berkibar megah di depan markas tidak luput dari sasaran keganasan tentara Belanda untuk diganti dengan bendera tiga warna.

Pemerkosaan terhadap bendera Merah Putih yang dilakukan oleh serdadu Belanda tidak dapat diterima oleh Ny. Erna Sutoto Jayadiningrat bagitu saja. Nyonya Erna Sutoto Jayadiningrat melakukan protes keras kepada Van Hoogstraten selaku atasan serdadu Belanda. Dengan semangat merdeka yang menyala, ia menuding muka pejabat Belanda itu. Mereka bertekad dengan cara apa pun dan bagaimana pun, bendera pusaka Sang Merah Putih harus dijaga dan diselamatkan serta dipertahankan sampai titik darah penghabisan.

Melihat keadaan srikandi-srikandi muda yang tabah dan gigih, sedangkan keamanannya terganggu dan jiwanya terancam bahaya, Walikota Jakarta Suwiryo menganjurkan supaya memindahkan markas dapur umum ke tempat lain yang lebih aman. Sehubungan dengan itu ditunjuk tempat yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur No. 17 (sekarang Asrama Mahasiswa Universitas Indonesia). Pemindahan ini dengan alasan bahwa tempat tersebut berdekatan dengan CBZ *(Centrale Burgerlijke Ziekenhuis)* yang sekarang menjadi Rumah Sakit Dokter Tjipto Mangunkusumo. Di sini banyak dokter yang bertugas dan mereka itu adalah pejuang-pejuang yang gigih dalam Pergerakan Nasional. Para dokter tersebut setiap saat dapat memberikan petolongan apabila petugas-petugas dapur umum mengalami kesulitan. Dengan demikian komunikasi lebih lancar dan kerjasama dapat terbina dengan lebih baik antara semua eksponen pejuang.

Letak gedung Pegangsaan Timur No. 17 agaknya menjorok ke dalam, arealnya luas dengan halaman yang rimbun oleh pepohonan dan lokasinya strategis sehingga mudah dicari karena terletak di tengah kota. Di tempat baru inilah Ny. Erna Sutoto Jayadiningrat melancarkan perjuangan dalam melaksanakan kegiatan dapur umum dengan bantuan teman-teman seper-

juangan dan beberapa pelajar antara lain Peggy Sunyoto, Ruswita, Umi Wibisono, Kusnadi, Busyra, Kusye, dan lain-lain. Selain wanita, di tempat itu juga terdapat beberapa pemuda pejuang yang masih berjuang dan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap karena berasal dari luar Jawa atau dari luar Kota Jakarta. Untuk menghindari kecurigaan Belanda, Ny. Erna Sutoto Jayadiningrat selaku penanggung jawab telah mengatur taktik yang tepat dan jitu. Hal ini pernah terjadi, suatu ketika tentara Belanda berusaha memasuki markas dapur umum ini dengan alasan untuk mencari para pejuang yang memang bermarkas di tempat ini. Dengan taktik diplomatis, Ny. Erna Sutoto mengatakan bahwa di rumah ini tidak ada pemuda, yang ada hanyalah pembantu yang tidak mengetahui apa-apa. Sementara itu dengan gerak isyarat yang diberikan, para pemuda pejuang disuruh mengupas kelapa, memarut, mengepel lantai dan lain-lain seperti layaknya pekerjaan pembantu. Akhirnya para pemuda yang diperlukan sebagai pembantu yang bertugas di dapur umum dapat terhindar dari bahaya dan tentara Belanda yang datang dengan garangnya itu dapat mempercayai apa yang dikatakan oleh Ny. Erna Sutoto Jayadiningrat.([13])

Dalam menyambut kemerdekaan, rumah Pegangsaan Timur No. 17, benar-benar telah menjadi markas perjuangan, karena bukan saja sekedar dapur umum, melainkan orang-orang perjuangan dari berbagai aliran datang silih-berganti dengan membawa aneka macam berita perjuangan dan di tempat ini terjadi saling tukar informasi. Dalam mengatur langkah taktis dan strategis perjuangan untuk menegakkan Republik yang muda usia, tempat ini menjadi ajang diskusi dan musyawarah para pemuda pejuang. Bung Karno, Bung Hatta, dokter-dokter dari CBZ, dan tokoh-tokoh pejuang lainnya tidak segan-segan datang mengunjungi rumah ini. Sebagai gambaran keakraban terlihat seperti dituliskan oleh Ny. Erna Sutoto, yang antara lain berbunyi :[14])

"Hubungan antara sesama pejuang pada waktu itu terjalin dengan penuh keakraban dan rasa persaudaraan, masing-masing menyadari bahwa persatuan dan kerjasama perlu ditingkatkan untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Kami semua kompak, pandang bulu, baik pemimpin maupun rakyat biasa menyadari bahwa perjuanganan belum selesai. Masih banyak hal perlu ditangani secara sungguh-sungguh; oleh karena itu dapur umum menjadi sangat sibuk, banyak manusia yang harus dilayani oleh dapur umum. Bukan hanya kantor-kantor pemerintah yang baru terbentuk itu saja yang dilayani oleh dapur umum, tetapi juga para pejuang tidak punya tempat tinggal yang tetap dan tidak mempunyai penghasilan semuanya kami tampung di dapur umum, termasuk dokter-dokter dan para petugas lainnya di CBZ".

Sejalan dengan aktivitas dapur umum Wani, setelah suntikan semangat rapat akbar di Lapangan Ikada (Monas) 19 September 1945 dalam rangka kebulatan tekad rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan, Ny. M. Dahlia Roem, seorang aktifis pergerakan wanita, terpanggil untuk turut berjuang dengan kemampuan yang ada. Ia juga menyediakan rumahnya yang terletak di Jalan Kwitang No. 10 Jakarta untuk menyelenggarakan kegiatan dapur umum.([15]) Rumah tersebut sudah dihuninya sejak tahun 1942 dan letaknya tidak jauh dari markas Batalyon Nica. Berhadapan dengan rumahnya itu terletak markas pemuda (bekas kantor Depkes). Di tempat ini berdiam Eri Sudewo dan mahasiswa-mahasiswa *Ika Daiqakkoo* (sekolah kedokteran). Kegiatan dapur umum ini tidak dapat berlangsung terus dilakukan oleh Ny. M. Dahlia Roem, karena kehadiran kembali tentara Belanda bersama Sekutu. Peristiwa ini bermula dari tindakan NICA yang menyerbu Kantor Polisi Republik Indonesia Seksi VI sehingga menewaskan 13 orang anggota Polisi RI. Karena tindakan yang brutal itu, maka Mohammad Roem bersama Suwiryo, walikota Jakarta, yang duduk dalam *Contact Committee* melakukan protes. Mereka menuntut supaya mengembalikan kepada Polisi RI, tetapi pihak Inggris hanya janji-janji saja dan tidak pernah dilaksana-

kan.([16]) Pada 21 November 1945 rumah Ny. M. Dahlia Roem diserbu oleh serdadu NICA. Mohammad Roem tertembak dan persediaan dapur umum diangkut habis oleh serdadu-NICA. Mohammad Roem dengan pertolongan beberapa pemuda sekitarnya kemudian dibawa ke rumah sakit.

Sementara itu Ny. Suyatin Kartowiyono, salah seorang motor penggerak pergerakan wanita, ketika terbentuknya dapur umum Wanita Negara Indonesia (WANI) ditunjuk sebagai petugas bagian angkutan dapur umum Wani. Berhubung situasi sudah kurang menguntungkan dan ruang gerak semakin menyempit, begitu juga pos-pos dan markas perjuangan telah menjadi sasaran keganasan serdadu NICA, maka Ny. Suyatin Karotwiyono bersama Oemilah dibantu oleh seorang sopir, dengan sebuah kendaraan truk memindahkan mesin-mesin jahit dan perlengkapan lainnya dari Gudang SGKP Jalan dr. Sutomo Jakarta ke Kantor Palang Merah Indonesia (PMI) di Kramat. Pemindahan perlengkapan tersebut penuh dengan resiko, karena rute yang dilalui harus melewati Markas Batalyon X yang terletak dekat Lapangan Banteng (Hotel Borobudur) yang terkenal ganas dan telah banyak pejuang menjadi korban. Dengan didukung semangat kemerdekaan yang menyala, kedua srikandi tersebut dapat lolos dari pengamatan serdadu NICA. Ketika kendaraan mereka tiba di daerah Senen, terdengar letusan mortir. Bersamaan dengan itu truk mereka distop oleh tentara Gurka dengan mengacungkan senjata ke arah mereka. Sang sopir bermaksud menghentikan kendaraan tersebut, tetapi Ny. Suyatin memerintahkan supir untuk jalan terus. Mungkin karena serdadu itu ragu melihat penampilan Ny. Suyatin dan Oemilah yang mengenakan gaun, maka loloslah mereka dari penahanan. ([17]) Ketika tiba di kantor PMI Kramat, Daan Anwar melaporkan, bahwa ada wanita Belanda memasuki kantor PMI dan kemungkinan adalah mata-mata, tetapi ketika melihat Ny. Suyatin yang masuk, Daan Anwar menjadi diam.

Berhubung pertempuran terus berjalan sampai malam hari dan kantor Palang Merah Indonesia (PMI) juga sudah menjadi

sasaran peluru, maka Ny. Suyatin Kartowiyono terpaksa ikut bermalam di kantor ini. Untuk menghindari sasaran peluru, ia berlindung di bawah meja. Rahman Zakir menceritakan, bahwa Belanda mengumumkan, barang siapa yang dapat menunjukkan tempat persembuyian mereka berdua (Rachman Zakir dan Daan Anwar) akan diberi hadiah uang sebanyak 100 ribu gulden; karena itu Ny. Suyatin Kartowiyono mengingatkan supaya keduanya lebih berhati-hati, sebab Laskar Rakyat datang dari berbagai macam orang, mahasiswa, pelajar, pencopet, dan mungkin juga mata-mata Belanda. Keesokan harinya Ny. Suyatin Kartowiyono mendapat berita bahwa kedua pemuda itu, Rahman Zakir dan Daan Anwar, tertangkap dan ditembak. Rahman Zakir gugur, sedangkan Daan Anwar dapat diselamatkan.([18])

Berkaitan erat dengan peranserta kaum wanita dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, jangan dilupakan peran-peran yang dilakukan oleh Zuster Annie Senduk, kepala perawat Rumah Sakit Cikini yang telah melakukan aktivitas kemanusiaan di tempat ini dan kemudian menempatkan pusat kegiatannya di Gedung Kramat Raya No. 72 Jakarta. Kedudukan gedung ini tidak kalah pentingnya dengan markas dapur umum WANI di Pegangsaan Timur No. 17, karena di tempat tersebut Zuster Annie bersama perawat lainnya telah berbuat maksimal dalam memberikan andil kehidupan perjuangan mempertahankan kemerdekaan serta pengabdian terhadap nusa dan bangsa.

Zuster Annie Senduk memperoleh gedung tersebut dari seorang sosiawan dan pendukung perjuangan setelah Jepang bertekuk lutut dan bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Dengan memperoleh tempat ini, Zuster Annie memindahkan asrama perawat putri dari lingkungan Rumah Sakit Cikini di gedung Kramat Raya No. 72. Karena keadaan tempat ini memungkinkan untuk dimanfaatkan, maka selain menjadi asrama dibuka juga poliklinik dan rumah sakit darurat.

Tempat ini aman dan bebas, sehingga dapat menciptakan suasana pergaulan menjadi hidup dan komunikatif. Dari tempat inilah Zuster Annie Senduk bersama anak buahnya mengacungkan tangan perkenalan dengan para mahasiswa kedokteran yang bermukim di Hotel Du 'Pavilyon (Hotel Mojopahit, Harmoni). Di gedung Kramat Raya No. 72 ini pula Jo Abdurachman memperkenalkan Zuster Annie dengan dokter Satrio serta dengan calon-calon dokter lainnya.([19]) Sejak peristiwa itu terjalinlah kerjasama yang erat antara perawat yang menghuni asrama Kramat Raya No. 72 dengan mahasiswa kedokteran untuk memberikan dukungan serta bantuan terhadap pejuang-pejuang kemerdekaan yang menjadi korban. Untuk menanggulangi hal tersebut, para perawat dan mahasiswa kedokteran mendirikan pos-pos pertolongan di tempat-tempat terjadinya pertempuran.

Tepat sebulan lamanya sesudah proklamasi kemersekaan, Zuster Annie Senduk yang sibuk dalam tugasnya dikagetkan oleh mahasiswa kedokteran yang mengundangnya untuk mengikuti suatu pertemuan resmi yang diselenggarakan di Hotel Du 'Pavilyon. Rapat ini dihadiri oleh mahasiswa kedokteran dan juga pemuda-pemuda yang datang dari Menteng Raya 31, sedangkan pada meja pimpinan duduk di antaranya Dokter Muchtar, Dokter Bahder Djohan, Dokter Satrio, Mr. Maramis, Mr. Palengkahu, dan Zuster Annie Senduk, satu-satunya peserta wanita yang duduk di meja pimpinan.

Dalam kata sambutannya, pimpinan sidang mengemukakan bahwa maksud dan tujuan pertemuan itu adalah untuk membentuk Palang Merah Indonesia (PMI). Selanjutnya pimpinan sidang mengatakan :

> "Bahwa sekarang ini kita sudah merdeka. Kita sudah mempunyai negara yang berdaulat. Kita sudah bebas dari belenggu penjajah yang telah berabad-abad menjajah tanah air kita. Untuk itu kita harus membela dan mempertahankan matian-matian kemerdekaan kita ini, yang direbut dengan segala pengorbanan jiwa dan raga. Kita berkewajiban mengisi kemerdekaan ini dengan profesi

kita yaitu profesi kemanusiaan. Profesi untuk menolong sesama umat manusia yang membutuhkan pertolongan, sebagai dokter dan perawat".

"Kita bersama-sama berkumpul pada hari ini untuk membicarakan wadah kita. Membicarakan organisasi kita, sebagai orang-orang yang mempunyai profesi dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan tanah air. Hampir semua negara merdeka di muka bumi ini mempunyai apa yang dinamakan Red-Cross atau Palang Merah, yaitu organisasi kemanusiaan dari negara-negara yang bersangkutan. Untuk itu pula, sebagai negara yang sudah merdeka, kita semua akan membentuknya. Kita semua akan melahirkan suatu organisasi sebagai wadah pengabdian kita kepada bangsa dan tanah air, yaitu Palang Merah Indonesia". ([20])

Pertemuan yang bersejarah itu diakhiri dengan melakukan penandatanganan naskah pendirian Palang Merah Indonesia. Zuster Annie Senduk sebagai perawat senior diberi penghormatan oleh sidang untuk menandatanganinya. Dengan adanya badan Palang Merah Indonesia ini Zuster Annie semakin menjadi sibuk karena untuk sementara PMI bermarkas di Hotel Du 'Pavilyon. Untuk membantu kelancaran kerja PMI, ia menugaskan beberapa perawat dari asrama Kramat Raya No. 72 untuk membantu kegiatan PMI. Untuk mencukupi keperluan PMI, maka gudang-gudang makanan dan obat-obatan yang ada di seluruh penjuru Kota Jakarta diambilalih oleh Palang Merah Indonesia.

Dalam perkembangannya, tempat ini kemudian bukan saja sebagai kantor PMI tetapi juga sudah berfungsi sebagai markas pejuang, gudang makanan, tempat meyimpan obat-obatan, dan lain-lain.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemuda-pemuda, khususnya mahasiswa kedokteran yang bermarkas di Hotel Du'Pavilyon, telah tercium oleh intel-intel Jepang. Karena itu opsir-opsir Jepang di Jakarta sudah mengetahui bahwa banyak dokumen-dokumen penting tentang perjuangan di tempat ini. Untuk menghindari kemungkinan yang tidak menguntungkan, perjuangan harus secepatnya diselematkan. Dalam rangka itu

beberapa pemuda penghuninya berangkat menuju asrama perawat putri Kramat Raya No. 72 terutama untuk membicarakan permasalahannya dengan Zuster Annie dan supaya memperoleh kendaraan. Setelah ada saling pengertian antara kedua belah pihak, Zuster Annie menyanggupi untuk mendapatkan mobil. Ia bersama Sietje, staf pembantunya, naik sepeda ke Rumah Sakit Cikini karena di sana banyak mobil dokter-dokter Jepang yang dikenalnya. Sebelum berangkat ia berpesan kepada para pemuda tersebut, supaya yang dapat menyetir tinggal di sana, sedangkan yang tidak dapat pulang ke markas untuk bersiap-siap. ([21])

Dengan berbagai akal dan diplomasi, dokter Jepang yang masih bercokol di Rumah Sakit Cikini memberikan mobil-mobil tersebut untuk dipergunakan. Zuster Annie kemudian memerintahkan Sietje untuk memberitahukan kepada para pemuda yang menunggu di Kramat Raya No. 72. Tidak lama kemudian datang supir-supir amatir, di antaranya Suwardjono Suryaningrat, Mahar Mardjono, Husen Odon, Yusuf, dan Alex Kaligis serta beberapa pemuda lainnya. Mereka datang dengan pakaian yang lusuh, tetapi langkahnya tegap, dan sinar matanya garang penuh keberanian. Penampilannya persis seperti supir-supir truck jarak jauh, sedikit kumal, tetapi simpatik. Begitu tiba, Zuster Annie memberi instruksi supaya segera berangkat. Seketika itu pula pemuda-pemuda itu berlompatan memegang kemudi dan mederulah suara mobil meninggalkan Rumah Sakit Cikini sebagai kelompok *Mobille Colone* menuju tugasnya. ([22])

Pada 19 September 1945, tengah hari, deru iring-iringan mobil dari berbagai bentuk, di antaranya mobil tertutup, truk dengan bak terbuka dan ambulans memasuki halaman klinik Kramat Raya No. 72. Dengan sigap turunlah beberapa pemuda dan salah seorang menyampaikan surat perintah dari Dokter Satrio atas nama Palang Merah Indonesia, yang isinya memerintahkan kepada seluruh perawat untuk mengikuti rapat raksasa di Lapangan Ikada (Monas) dan sekaligus akan mempertotonkan

kepada rakyat bahwa Negara Republik Indonesia sudah mempunyai palang merah, Palang Merah Indonesia (PMI).([23]) Untuk melakukan rapat raksasa ini sebenarnya pemuda-pemuda sudah lama mendesak perintah agar secepatnya dilaksanakan, tetapi hal tersebut selalu dihalang-halangi oleh penguasa Jepang sebagai pihak yang kalah.

Untuk melaksanakan perintah tersebut, Zuster Annie Senduk selaku pimpinan memerintahkan agar semua kekuatan anak buahnya yang berjumlah 60 orang perawat untuk ikut aktif dalam acara yang akan dilangsungkan itu. Mereka kemudian beramai-ramai menyiapkan segala perlengkapan yang diperlukan. Dengan bahan-bahan seadanya seperti gordijn maupun sprei dibuat menjadi bendera Palang Merah Indonesia dan *bagde* palang merah seadanya. Juga dibuat topi putih yang berlambangkan palang merah seadanya, karena yang penting adalah pergi bersama dengan mengenakan seragam palang merah.

Dalam waktu yang relatif singkat semua perlengkapan, meskipun darurat, telah terselesaikan. Bendera Merah Putih diikatkan menjadi satu dengan bendera Palang Merah Indonesia pada sepotong bambu kemudian dikibarkan di samping depan dan pinggir-pinggir bak truk, sehingga kelihatan menambah semaraknya suasana. Lebih meriah lagi karena setiap kendaraan itu isinya dipertotonkan nona-nona manis yang berseragam putih-putih dengan *badge* palang merah, topi putih terpampang badge palang merah.

Dengan tertib dan teratur satu-persatu mobil yang telah berhiaskan palang merah bergerak meninggalkan gedung Kramat Raya No. 72 menuju jalan raya. Deru konvoi itu tenggelam dalam sorak-sorai dan pekik merdeka. Rute yang dilalui barisan mobil palang merah ini adalah Kramat – Senen – Pasar Baru, kemudian berbelok-belok ke Harmoni melewati markas Palang Merah Indonesia di Hotel Du'Pavilyon menuju Lapangan Ikada (Monas) dan berhenti di depan Stasiun Gambir untuk menanti kehadiran Soekarno – Hatta. ([23])

Sementara itu rakyat dengan semangat yang bergelora terus berdatangan menghimpit lapangan dengan tidak memperdulikan bayonet serdadu Jepang yang siap terhunus. Mereka tidak gentar melihat tentara Jepang yang menggelar mesin perangnya pada setiap pojok dan pintu masuk lapangan. Rakyat terus mengalir laki-laki dan perempuan memadati lapangan tanpa mempedulikan ancaman Jepang.

Berhubung adanya larangan dari tentara Jepang, sedangkan rakyat datang berduyun-duyun menuju Lapangan Ikada, maka Soekarno meminta Suwiryo selaku walikota Jakarta untuk membicarakan permasalahan tersebut dengan pembesar tentara Jepang. Sehubungan dengan itu Suwiryo mengajak Mohammad Roem berangkat bersama ke markas *Kempetai* (Departemen Pertahanan Keamanan), Jalan Merdeka Barat Jakarta. Pada mulanya pihak Jepang bersikeras, mereka tidak memperbolehkan pelaksanaan rapat besar-besaran di Lapangan Ikada. Hal ini disebabkan pihak Jepang khawatir akan timbul hal yang tidak diinginkan sehingga merugikan kedudukan Jepang sebagai pihak yang kalah. Karena itu pembesar tentara Jepang itu memerintahkan kepada Suwiryo – Roem supaya membubarkan massa dan menyuruh pulang, tetapi dengan taktik diplomatik mengatakan, bahwa mereka tidak kuasa membubarkannya, yang mempunyai kuasa membubarkan adalah Soekarno – Hatta. ([24]) Mendengar itu pihak Jepang melakukan konsultasi sesamanya dan kemudian Jepang mengusulkan supaya Soekarno–Hatta datang ke Lapangan Ikada tidak boleh lebih dari 15 menit.

Dengan kesempatan yang terbatas itu Soekarno – Hatta diiringi oleh pejabat yang lain memasuki lapangan melewati lautan massa rakyat yang telah lama menunggunya. Untuk menuju mimbar saja memerlukan waktu sekitar setengah jam lamanya. Berhubung terbatasnya waktu seperti yang disepakati Suwiryo – Roem dengan pihak Jepang, maka Soekarno menyampaikan pidato dengan singkat yang pada penutupnya berpesan, ". . . . . marilah kita sekarang pulang semua dengan tenang dan tenteram".

Rapat raksasa pada 19 September 1945 di Lapangan Ikada (Monas) Jakarta merupakan suatu pembuktian tekad bangsa dan rakyat Indonesia yang bulat mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara. Sebagai gambaran tentang situasi dan partisipasi rakyat pada waktu itu dapat terlihat seperti yang dituliskan Adam Malik dalam bukunya, *Riwayat Proklamasi*, yang berbunyi : ([25])

> "Apakah arti istimewa dari rapat besar dan demonstrasi di Lapangan Ikada tanggal 19 September 1945 itu ?
> Kenyataan ini ialah : dengan sekali pukul pelbagai gerombolan dan pelbagai anasir yang ada dalam masyarakat yang terpecah-pecah selama ini dapatlah disatukan. Perhubungan antara satu dengan yang lainnya mulai kelihatan dan dengan ini dapatlah rakyat banyak itu menginsyafi arti kemerdekaan dan proklamasinya. Laki-laki, perempuan, bersekolah atau tidak, pemuda-pemuda dari desa maupun dari udikan, utusan-utusan yang datang dari jauh dari luar kota Jakarta, dengan tidak dipanggil atau diminta datang, dengan serentak mengalir sebagai arusnya air. Demikianlah mereka datang membanjiri lapangangan tersebut. Lebih dekat ke tempat lapangan itu lebih rapat penjagaan militer Jepang yang bersenjatakan sangkur dan tommygun, tetapi tantangan rakyat ketika itu untuk memasuki lapangan tersebut lebih berani dan lebih nyata. Orang-orang yang tadinya merasa lemah karena terpencar sendiri-sendiri, atau karena merupakan gerombolan kecil, dengan turutnya dalam demonstrasi dan rapat itu merasa dilebur menjadi satu dengan gerombolan umum, merasa dipadu menjadi satu dalam badan baru yang lebih kuat dan kuasa, dan oleh karenanya naiklah kekuatan baru yang menjolak-jolak".
>
> "Demonstrasi itu menggelagakkan kembali air yang sudah beku tiap-tiap orang merasa lemah, sekalipun telah bersatu di lapangan itu, dengan orang-orang yang merupakan banjir yang gemuruh dari massa yang datang berdesak-desakan itu tercengang dan gembira melihat kemauan dan kekuatan massa yang melimpah-limpah dan keberanian mereka yang tak memperdulikan bahaya yang ada dihadapan matanya ketika itu".

Demikianlah sekedar gambaran pada saat itu. Bagi Palang Merah Indonesia, saat itu adalah suatu kebanggaan, karena pertama kalinya tampil di tengah-tengah masyarakat, dan pada

waktu itu pula rakyat tahu bahwa mereka telah mempunyai Palang Merah yang tidak kalah hebatnya dengan Palang Merah negara-negara lain.

Sejak peristiwa itu Zuster Annie Senduk beserta anak buahnya yang telah mendapat kepercayaan dari Palang Merah Indonesia terus sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ketika terjadi peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, dari pusat ia mengirimkan para perawat putri dan mereka itu telah turun ke palangan menerobos asap mesiu untuk memberikan bantuan kepada mereka yang berjatuhan.

Dengan membubarkan *Fujinkai,* kaum wanita kemudian membentuk barisan-barisan untuk mendukung perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Pengalaman-pengalaman selama bergabung dengan *Fujinkai* dimanfaatkan untuk kepentingan perjuangan. Akan tetapi karena keadaan geografis Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau menyulitkan penyebaran berita yang perlu disampaikan dalam waktu singkat. Hal demikian menyebabkan terlambatnya gerak dan partisipasi dalam menyambut kemerdekaan bila dibanding dengan wilayah Indonesia bagian barat. Untuk Pulau Jawa, dalam menerima berita kemerdekaan tidaklah terlalu jauh perbedaannya sehingga hampir semua kekuatan pendukung cepat terbentuknya.

Sehubungan dengan itu kaum wanita Jawa Barat yang aktif mengikuti perkembangan Jakarta, dengan segera membentuk wadah perjuangan yang bergerak dalam kepalangmerahan, dapur umum, dan kegiatan lainnya. Dalam hal ini yang menghimpun tenaga wanita adalah Inspektorat Wanita di Garut, Budi Istri di Bandung ataupun kaum wanita aktif dalam kelaskaran-kelaskaran bersama kaum pria.

Untuk menggalang perjuangan kaum wanita, maka pada 10 Oktober 1945 di Bandung dibentuk Laskar Wanita (LASWI) yang dipimpin oleh Ny. S. Aruji Kartawinata. Tujuan badan ini adalah untuk membantu perjuangan, baik di garis belakang maupun kepentingan garis depan dalam mengangkat senjata.

Karena itu laskar ini dilatih dalam kemiliteran dan kepalang-merahan. Adapun anggota-anggotanya adalah remaja-remaja putri. ([26])

Sejalan dengan langkah ini kaum wanita Jawa Tengah khususnya Yogyakarta dan Surakarta yang juga telah memperoleh pengalaman banyak dari *Fujinkai,* dengan segera membentuk badan-badan perjuangan. Berhubung telah terjadi pertempuran dengan pihak Jepang, maka kaum wanita Surakarta pada 12 Oktober 1945 membentuk Persatuan Wanita Indonesia (Perwani). Pada 30 Oktober 1945 didirikan Laskar Putri Indonesia (Perwani). Pada 30 Oktober 1945 didirikan Laskar Putri Indonesia (LPI) yang dipelopori tiga bersaudara yaitu Srini, Ibnoe Oemar, dan Sarwiten dibantu oleh Sadiyem dan Sayem. Untuk meningkatkan keterampilan, laskar ini diberi latihan baris-berbaris, PPPK dan keterampilan lain seperti memasak dan menjahit. Mengenai latihan kemiliteran para gadis ini mendapat latihan seperti halnya dengan prajurit laki-laki. ([27])

Setelah menerima berita proklamasi pada 18 Agustus 1945, tokoh-tokoh pejuang di Surabaya segera menghimpun tenaga-tenaga kader yang tergabung dalam kelompok pemuda dan putri dengan maksud agar mereka itu senantiasa siap menghadapi segala kemungkinan. Dengan adanya satu pengertian yang erat, para pemuda/putri ini telah turut serta dalam melakukan aksi pengibaran bendera Merah Putih dari rumah ke rumah dan kantor-kantor di seluruh pelosok Kota Surabaya. Selain itu mereka juga melakukan aksi corat-coret dan penempelan poster-poster dan kemudian turut menggerakan massa untuk rapat raksasa di Tambaksari pada 21 September 1945.

Pada awal September 1945 Persatuan Pemuda Putri yang terdiri atas kelompok-kelompok pemuda pelajar/mahasiswa, pemuda kantor/pegawai, dan pemuda kampung mengadakan rapat di Gedung Nasional Bubutan Surabaya. Hasil rapat ini adalah pembentukan Pemuda Putri Republik Indonesia yang merupakan federasi dari tiga unsur kelompok pemuda dengan susunan pengurus, Lukitaningsih (Kantor Berita Dumai) se-

bagai ketua, Mursia (Pemuda Pelajar) sebagai wakil ketua, Maasye Siwi (Kantor Kotapraja Surabaya) sebagai sekretaris, dan Yetty Zein (mahasiswa) sebagai bendahara.

Adapun rencana kerja Pemuda Putri Republik Indonesia (PPRI) adalah membentuk Laskar Putri, mendirikan pos PPPK, mendirikan dapur umum, dan menolong para pengungsi. Untuk itu kemudian dibuka kesempatan bagi para pemuda untuk menggabungkan diri dengan Laskar Putri ini. Hal ini ternyata mendapat sambutan yang hangat dari para pemuda. Ini terbukti dalam tempo yang singkat telah terdaftar 200 remaja putri yang siap diasramakan. Sayang sekali sebelum rencana ini berjalan, meletuslah Peristiwa 10 November 1945 sehingga sebanyak 50 orang tenaga Laskar Putri ini harus menjadi tenaga inti dari Korp Palang Merah Indonesia. Mereka harus menyusup ke tengah-tengah medan pertempuran guna menolong korban perang. Di sinilah nama Lukitaningsih sebagai komandan tampil dengan semangat juang yang tinggi. Selain itu di bawah pimpinan Ibu Soetopo diadakan latihan PPPK seperti balut-membalut dan perawatan di Rumah Sakit CBZ Surabaya.([29])

Sementara itu untuk mengukuhkan persatuan gerak kaum wanita, pada 17 Desember 1945 di Klaten dibentuk Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI) yang diketuai oleh Ny. Mangunsaskoro dan Ny. ND. Hadi Prabowo. Dengan berdirinya badan ini berarti telah hidup wadah kaum wanita sebagai lanjutan dari kongres-kongres wanita sebelumnya.

Dalam rangka menyambut kemerdekaan, kaum wanita di wilayah Indonesia bagian barat, khususnya kaum wanita Sumatera dari utara sampai ke selatan bangkit bersama kaum pria secara bersamaan. Aktivitas kaum wanita bukan saja mempersiapkan diri di garis belakang seperti dapur umum, tetapi juga telah terpanggil untuk menghimpun dana perjuangan berupa barang perhiasan seperti yang dilakukan oleh wanita Aceh, begitu juga kaum wanita Sumatera Timur. Di bawah pimpinan permaisuri Sultan Siak, telah dilakukan pengumpulan barang perhiasan untuk keperluan badan-badan perjuangan. Untuk

memperkuat barisan, maka tokoh-tokoh wanita dari Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli yang ketika itu tergabung dalam wilayah Sumatera Utara membentuk barisan Srikandi. Barisan ini dipersiapkan dengan keterampilan militer, dapur umum, dan keterampilan operator radio. ([30])

Tokoh-tokoh wanita di wilayah Sumatera Utara di antaranya adalah Teungku Haji Ainal Mardhiah, Rohana Hasyim, Tjut Mariam, Tjut Mirsan dari Aceh, sedangkan dari Sumatera Timur di antaranya adalah Ny. Ahmad Taher dan Ny. Anie Idrus, serta Ny. FL. Tobing dari Tapanuli. Tokoh ini telah berjuang secara maksimal dalam mempertahankan kemerdekaan.

Sementara itu kaum wanita di bagian Sumatera Tengah yang terpusat di Sumatera Barat mendirikan organisasi kewanitaan seperti Keputrian Republik Indonesia. Tokoh-tokohnya antara lain adalah Malahayati Abdullah, Titi Akman, Julinar Sulaeman, Sofia Matha Lena, dan Nurvahri. Pada 2 Oktober 1945 berdiri Laskar Sabil Muslimat yang berpusat di Padang Panjang. Anggota laskar ini terdiri atas gadis-gadis pelajar menengah dari *Kolyatul Mubaliqhat, Normaal School,* dan Diniyah Putri di Padang Panjang, Mahad Islami Payakumpuh dan *Kweekschool* Padang. Anggota lainnya terdiri atas remaja-remaja putri yang tidak lagi bersekolah. Laskar lainnya adalah Laskar Muslimat, yang merupakan bagian putri dari Partai Perti dengan pusatnya di Bukittinggi. Adapun tokoh-tokohnya antara lain adalah Rosni Zainal, Norma Alamsuddin, Sariani, Maljani Manan, Rohana Zainal, Nurjani Tanjung, Suliyah Batipuh, Jaura Labuh, Nurijah Ahmad, Lawijah Batusangkar, Ramani Nurisan, dan Latifah Bonjol dengan penasihat Umi H. Salima. ([31])

Salah satu kegiatan organisasi tersebut ialah seperti Keputrian Republik Indonesia, yakni membentuk seksi penerangan. Hal ini dilakukan mengingat bahwa penerangan tentang kemerdekaan dan perjuangan sangat penting untuk diteruskan pada masyarakat luas. Untuk menangani hal tersebut diangkat

Nurjanah Assah, Sabatiar Abyat, dan Kamsanah Wahab sebagai penanggungjawab seksi ini. Kegiatan lainnya adalah dapur umum guna mempersiapkan makanan bagi mereka di garis depan. Di antara anggota Keputrian Republik Indonesia menggabungkan diri dengan Palang Merah Indonesia (PMI) yang diketuai oleh Ida Bahar dan Zawiah Usman. Selain kepentingan garis depan, anggota Keputrian Republik Indonesia juga berperan sebagai pendidik untuk mencerdaskan bangsa. Seksi ini ditangani oleh Darmajanti Akram, Martalena Amin, Julinar Rasjid, Nursara, dan Rukmini Alman. Adapun Julinar Rasjid ditegorkan khusus untuk menangani Taman Kanak-kanak.([32])

Kegiatan lain yang dilakukan oleh Keputrian Republik Indonesia adalah mengumpulkan dana perjuangan di Padang. Untuk kegiatan ini dibentuk semacam komite yang anggotanya terdiri atas Jusni Arifin, B. Datuk Tumenggung, Sjofia, Kartini, Asra, dan Ademar Kadenan, sedangkan Ratna Sari bertindak sebagai penasihatnya. Kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan untuk kepentingan perjuangan.

Sejalan dengan itu, kaum wanita di Sumatera terutama di Tanjung Karang (sekarang Lampung) pada 27 Oktober 1945 membentuk Gerakan Putri Indonesia (Gerpi). Kegiatan organisasi ini adalah mengusahakan dapur umum, terutama ditujukan untuk para *romusha* dari seluruh Sumatera yang akan dipulangkan ke tempat asalnya.

Sementara itu kaum wanita di wilayah Indonesia bagian timur turut aktif membantu para pemuda dalam menyambut dan mempertahankan kemerdekaan. Mereka menggabungkan diri dengan badan-badan yang tergabung dalam kepemudaan ataupun masuk dalam badan-badan kewanitaan. Sejalan dengan berdirinya Persatuan Pemuda Indonesia (PPI) yang dinamakan Laskar Banteng pada 17 September 1945 di Sulawesi Utara khususnya Bolaang Mangondow, dibentuk pula kelaskaran bagian wanitanya yang dipelopori oleh Ny. Damopoli, istri Kepala Daerah Bolaang Mangondow. Anggota-anggotanya terdiri atas Pandu Putri PSII yang bernama SIAP (Serikat

Islam Afdeeling Pandoe) yang dipimpin oleh Hasinah Mokobombang dan anggota lainnya adalah pelajar HIS *(Hollands Inlansche School)* serta sekolah lainnya yang dikelola oleh Yayasan Tjokroaminoto. Mereka itulah pelopor pejuang wanita di Sulawesi Utara. (33)

Dalam menjalankan aktivitasnya Ny. Damopoli alias Nurtina Gonibala sejak bulan September 1945 melakukan latihan di Desa Moliow dekat Kotamobagu dengan pelatihnya bekas *heiho, keibodan,* dan lain-lain. Karena kegiatan tersebut dicurigai Belanda, maka pada 27 September 1945 JFK. Damopoli, suaminya, ditangkap dan dibuang ke Manado. Selanjutnya pimpinan Laskar Benteng diambilalih oleh Ny. Damopoli beserta pengikutnya. Di antaranya ialah Hatidah Mokobombang sebagai ketua Onder Departemen Wanita PSII Mongondow. Pengikut lainnya ditangkap Belanda dan dimasukkan ke penjara Manado. (34)

Pada bulan November 1945 beberapa orang nasionalis mendirikan Yayasan Pendidikan Bangsa, yang mengajarkan semangat kebangsaan. Tenaga pengajarnya adalah Ny. Senduk Kaligis, Ny. Adam, dan Ny. Muntuk.

Kaum wanita Gorontalo giat membantu keperluan-keperluan perjuangan seperti obat-obatan. Tokoh-tokohnya antara lain, Zus Wartabone, Eki Nesin, Fin Bijai, Ni Kok Tien, Kusnah Manguntjeh, Salama Jafar, dan Sarah Abas. Sejalan dengan gerak ini kaum wanita di Sangir Talaud pada bulan Oktober 1945 mendirikan juga persatuan wanita, Indonesia Siaw, yang dipimpin oleh Ny. F. Pasandaran Lalingsang. Salah satu usahanya ialah mempertahankan Sangir Talaud sebagai wilayah Republik Indonesia. (35)

Kaum wanita di Sulawesi Selatan juga turut aktif bersama para pemudanya untuk berjuang menyambut kemerdekaan. Tokoh-tokoh wanita daerah ini tampil dengan mendirikan organisasi kewanitaan ataupun kelaskaran, seperti Siti Mulyati Hasyim dengan pasukan wanitanya, Ruaidah dengan Divisi

Melati yang tergabung dalam kelaskaran Kris Muda Mandar, Ibu Depo bang Samandar yang telah menentang Belanda sejak tahun 1906, Syarifah Ragwan mengikat kerjasama dengan semua pejuang, dan Ny. H. Umi Hani A. Salam yang aktif dalam dua kelaskaran yaitu duduk sebagai anggota Majelis Kewanitaan, sekretaris Persatuan Wanita Majene (PWM), sebagai pimpinan dan anggota Laskar Wanita Melati dalam Kris Muda,([36]) serta masih banyak lagi wanita lain yang telah menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk kemerdekaan.

Organisasi Aisiyah juga turut berperan dalam menanamkan perasaan dan semangat perjuangan agar kaum wanita membantu perjuangan bersama-sama kaum pria. Organisasi wanita lainnya adalah Persatuan Wanita Penolong Sosial yang didirikan oleh Ibu Ratulangi. Organisasi ini bergerak dalam bidang dapur umum, Palang Merah, dan bidang pendidikan, sama seperti yang dilakukan oleh Serikat Istri Celebes.

Sejalan dengan itu wanita Bali juga aktif membantu perjuangan dalam kepalangmerahan yang dipimpin oleh Ny. Nyoman Seriati. Kaum wanita yang terlibat terutama anak-istri dari Barisan Pejuang Indonesia (BPI) yang didirikan pada bulan Desember 1945.

Menyambut kemerdekaan di Maluku sedikit mendapat hambatan karena ada pihak yang menghendaki dan mendukung kembalinya kekuasaan Belanda.([37]) Namun demikian, pada bulan Desember 1945 telah dapat dibentuk Barisan Pejuang Indonesia (BPI) di Ambon oleh dr. Sudibyo, EU. Pupella, Rokhyat, dan Wim Reawaru. Barisan ini mempunyai satu laskar yang dipimpin oleh Mohammad Qosim Maruapei. Kaum wanitanya memegang peranan penting terutama para istri dan anak-anak pengurus dan anggota Badan Pejuang Indonesia (BPI). Mereka mempunyai tugas berat terutama untuk menanggulangi keadaan ekonomi yang sangat sulit pada masa itu. Untuk itu kaum wanita mencari bahan makanan guna menunjang kehidupan keluarga dan menyiapkan makanan bagi para anggota organisasi yang mengadakan rapat rahasia.

Demikianlah peranserta kaum wanita dalam menyambut dan mempertahankan kemerdekaan di seluruh pelosok tanah air. Kaum wanita telah menyumbangkan tenaga dan pikiran secara maksimal yang disalurkannya melalui organisasi kewanitaan dan bahkan dalam kelaskaran-kelaskaran atau Barisan Srikandi baik di garis belakang maupun di garis depan. Semua itu agaknya telah disumbangkan untuk nusa dan bangsanya.

CATATAN BAB IV

1. *Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi,* Kumpulan Pengalaman dan Pemikiran, Buku I, catatan kedua, Jakarta, Penerbit Sinar Harapan, 1984, hal. 248.
2. Soebagiyo I.N. *SK. Trimurti,* Wanita Pengabdi Bangsa, Jakarta, PT Gunung Agung, 1982, hal. 81.
3. Kongres Wanita Indonesia (Kowani), *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia,* Jakarta, Balai Pustaka, 1986, hal. 93 – 94.
4. Adam Malik, *Riwayat Dan Perjuangan Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia,* 17 Agustus 1945, cetakan ketujuh, Jakarta Penerbit Widjaya, 1982, hal. 90.
5. *Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi,* Kumpulan Pengalaman dan Pemikiran, Buku IV, Cetakan pertama, Jakarta, Penerbit Sinar Harapan, 1984, hal. 154.
6. Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi, op-cit, hal. 270.
7. *Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi,* Kumpulan Pengalaman dan Pemikiran, Buku II, cetakan pertama, Jakarta, Penerbit Sinar Harapan, 1982, hal. 118–119.
8. Chaniago J.R. dkk., *Lembaga Tinggi Negara,* Jakarta, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Depdikbud, 1987, hal. 42.

9. *Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi*, Kumpulan Pengalaman dan Pemikiran, Buku III, cetakan pertama, Jakarta, Penerbit Sinar Harapan, 1983, hal. 21.

10. Kongres Wanita Indonesia (Kowani), op-cit, hal. 94

11. *Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi*, Kumpulan Pengalaman dan pemikiran, Buku III, cetakan pertama, Jakarta, Penerbit Sinar Harapan, 1983, hal. 22.

12. Ibid, hal. 23

13. Ibid, hal. 24

14. Ibid, hal. 25

15. Ibid, hal. 116–117.

16. *Mohammad Roem 70 Tahun*, Pejuang Perundingan, cetakan pertama, Jakarta, Penerbit Bulan Bintang, 1978, hal. 50 – 51.

17. *Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi*, Kumpulan Pengalaman dan Pemikiran, Buku I, Cetakan kedua, Jakarta, Penerbit Sinar Harapan, 1984, hal. 248 – 249

18. Ibid, hal. 249

19. Ibid, hal. 49

20. Kutipan Ibid, hal. 47–48

21. Ibid, hal. 49 – 52

22. Ibid, hal. 53 – 54

23. Ibid, hal. 55 – 56

24. Mohammad Roem, op–cid, hal. 47

25. Adam Malik, op–cid, hal. 95

26. MPB. Manus, dkk., *Peranan Wanita Indonesia Di Masa Perang Kemerdekaan* (1945–1950), Proyek IDSN, Depdikbud, Jakarta, 1985, hal. 63–64.

27. Ibid, hal.77 – 85

28. Ibid, hal. 118–119.

29. Ibid, hal. 120
30. Ibid, hal. 43–50
31. Ibid, hal. 52
32. Ibid, hal. 53
33. Nana Nurliana, dkkl, *Peranan Wanita Indonesia Di Masa Kemerdekaan* (1945 – 1950), proyek IDSN, Depdikbud, Jakarta 1986, hal. 70
34. Ibid, hal. 71–72
35. Ibid, hal. 74
36. Ibid, hal. 84–92
37. Ibid, hal. 103–104.

PENUTUP

Sebagai penutup dapat ditarik beberapa kesimpulan. Sejak semula kaum wanita Indonesia aktif berperan dalam perjuangan bangsa. Demikian pula pada masa Pergerakan Nasional. Mula-mula hanya bersifat perorangan atau dalam kelompok terbatas seperti yang dilakukan Kartini dan Dewi Sartika di Jawa Barat. Mereka ini berusaha mendobrak dan menghilangkan persepsi baik pemerintah kolonial maupun penguasa tradisional tentang wanita. Dengan mendirikan sekolah di kalangan terbatas mereka berusaha memperbaiki kedudukan sosial wanita dalam perkawinan dan keluarga serta meningkatkan kecakapan sebagai ibu dan pemegang rumah tangga.

Setelah Budi Utomo berdiri, muncul berbagai perkumpulan wanita yang pada dasarnya tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat wanita. Putri Mardika di Jakarta (1912) didirikan untuk memberikan bantuan, bimbingan, dan penerangan kepada gadis-gadis pribumi dalam menuntut pelajaran dan menyatakan pendapat di muka umum dan lain-lain hal yang belum diketahui. Perkumpulan *Kartini Fonds* bertujuan untuk meningkatkan derajat wanita melalui pendidikan di sekolah yang mereka dirikan. Perkumpulan ini banyak mendirikan sekolah di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal semacam ini dilakukan juga oleh Sekolah Kautamaan Istri di Jawa Barat, Pikat di Menado, Kerajinan Amal Setia di Sumatera Barat, dan lain-

lain. Selain melalui sekolah mereka juga mencoba meluaskan gagasan melalui penerbitan media massa. Seperti yang dilakukan Amal Setia dengan *Sunting Melayu* dan Pikat dengan *Tjahaya Siang.*

Di samping itu ada pula perkumpulan wanita yang bertujuan untuk meningkatkan kecakapan yang bersifat khusus seperti memasak, menjahit, merenda, dan lain-lain. Perkumpulan semacam ini antara lain adalah Pawiyatan Wanito di Magelang tahun 1915. Wanito Susilo di Pemalang tahun 1918, Wanito Hadi di Jepara tahun 1915, Wanito Rukun Sentosa di Malang, dan lain-lain. Selain itu ada perkumpulan wanita yang bersifat keagamaan seperti Sopo Tresno di Yogya yang kemudian menjadi Aisyiah, Sarikat Siti Fatimah di Garut, dan Wanodya Utomo di Yogya.

Setelah tahun 1920 jumlah perkumpulan wanita semakin banyak dan kegiatannya pun semakin luas. Seperti *De Gorontalosche Mohammadanch Vrauwch Vereniging* di Gorontalo, Wanito Utomo di Yogyakarta. Banyak juga yang bercorak kebangsaan dan bahkan politik seperti Ina Tuni di Ambon, *Yong Java Meisyeskring,* Wanita Taman Siswa, *Yong Islamieten Bond Dames Afdelling,* dan Putri Indonesia.

Pada tahun 1928 para pemuda menyelenggarakan kongres kedua dan menghasilkan suatu keputusan yang kemudian disebut Sumpah Pemuda. Di kalangan kaum wanita juga muncul gagasan untuk mengadakan perikatan di antara perkumpulan-perkumpulan yang ada atas prakarsa tujuh organisasi wanita. Di Yogyakarta dibentuk Komite Kongres Perempuan yang bertugas untuk mewujudkan adanya satu perikatan organisasi wanita. Komite ini kemudian menyelenggarakan Kongres Perempuan Indonesia I dan membentuk Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI). Untuk menyampaikan gagasan-gagasannya, PPPI menerbitkan surat kabar *Istri,* sedangkan untuk menolong gadis-gadis dibentuklah sebuah *studie fonds* yang kemudian berkembang menjadi Yayasan Seri Dharma.

Pada tahun 1938 kegiatan kaum wanita Indonesia makin berkembang baik di bidang pendidikan, sosial dan bahkan politik. Pada saat itu empat orang wanita Indonesia ditunjuk untuk menjadi anggota Dewan Kota, bahkan dua orang wanita Indonesia berani mengajukan tuntutan "Indonesia Berparlemen" dan "Indonesia Merdeka".

Pada zaman pendudukan Jepang semua organisasi politik dan sosial yang telah ada dibubarkan. Kemudian dibentuk badan baru yang selaras dengan kepentingan perang Jepang. Di kalangan wanita Jepang mula-mula membentuk Gerakan Isteri Tiga A dengan Barisan Puteri Asia Raya, Kemudian dibentuk pula Pekerja Perempuan Putera. Tugasnya antara lain mengerjakan berbagai pekerjaan tangan dan menjadi juru penerang terutama pada ibu-ibu di desa agar bersedia menyerahkan anaknya untuk menjadi *keibodan* dan *seinendan*.

Untuk menampung semua bentuk kegiatan wanita, Jepang mendirikan *Fujinkai* baik di tingkat pusat maupun daerah. Istri-istri pamong praja diharuskan menjadi anggota *Fujinkai*. Adapun tugasnya adalah membantu garis depan dengan memperkuat garis belakang. Hal ini dijalankan dengan latihan kepalangmerahan, penggunaan senjata, penyelenggaraan dapur umum, mengerjakan keperluan serdadu, memperluas tanaman bahan makanan, meningkatkan populasi ternak, dan menggalakkan penanaman kapas. Di Jakarta *Tukobetsu si Fujinkai* dipimpin Ny. RA Abdurachman, sedangkan Barisan Puteri dipimpin oleh Siti Dahlia.

Ketika Putera dibubarkan dan kemudian dibentuk *Jawa Hokokai*, *Fujinkai* dilebur menjadi *Jawa Hokokai Fujinkai*. Mula-mula badan ini termasuk bagian urusan pendidikan namun kemudian merupakan badan yang berdiri sendiri dengan nama *Jawa Hokokai Fujinkai Jimukyoku*, sedangkan bagian putrinya disebut *Joshi Seinenkai*. Kegiatan *Fujinkai* pada hakekatnya melaksanakan segala sesuatu dengan nyata dan ikhlas untuk menyumbangkan segenap tenaga kepada Pemerintah Jepang,

memimpin rakyat untuk menyumbangkan tenaga berdasarkan semangat persaudaraan antara bangsa, dan memperkokoh pembelaan tanah air.

Dengan demikian kelihatannya semua wanita dengan mudah dapat dihimpun Jepang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan badan resminya. Namun sebenarnya banyak di antara mereka yang mempergunakan kegiatan resmi itu untuk "tujuan" mereka sendiri lebih lanjut dan bahkan ada yang secara terang-terangan menolak untuk kerjasama dengan Jepang. Sikap yang pertama antara lain terlihat pada gerakan Ny. Srikanah Kumpul, ketua *Fujinkai* Medan dan Ny. Siti Larang Sosrokardono yang mendorong agar para pemuda ikut mendaftarkan diri sebagai anggota Peta, karena menurut perhitungannya, dengan mengikuti kesempatan tersebut para pemuda akan memperoleh keterampilan dan keahlian yang profesional dalam bidang kemiliteran yang kelak akan berguna bagi Indonesia Merdeka.

Sikap yang kedua, antara lain ditunjukkan oleh Ny. Martowiyono yang dengan tegas menolak bergabung dengan *Fujinkai*, Ny. Badilah Zuber, seorang pendakwah yang pernah dituduh menghina Pemerintah Jepang, Ny. SK. Trimurti, Ny. Johanna Masdani, Ny. Sri Maryam Abednego, Ny. Maria Hutasoid dan lain-lain.

Dalam menyambut kemerdekaan, wanita pun tidak mau ketinggalan dengan kaum pria. Tanpa segan-segan mereka ambil bagian dalam perjuangan baik secara perorangan maupun melalui organisasi. *Fujinkai*, organisasi wanita di zaman Jepang, dibubarkan dan kemudian dibentuk Persatuan Wanita Indonesia (Perwari) yang dengan giat mengumandangkan pekik "merdeka", mengibarkan bendera Merah Putih, dan memakai lencana merah putih, serta membantu Komite Nasional Indonesia (KNI) di daerah.

Untuk meningkatkan keterlibatan kaum wanita, Presiden Soekarno mengangkat Ny. Suwarni Pringgodigdo untuk menjadi

anggota dalam Dewan Pertimbangan Agung pada 25 September 1945. Nyonya Suwarni kemudian membentuk Wanita Negara Indonesia (WANI) untuk menyelenggarakan dapur umum dan tugas-tugas sosial lainnya. Tokoh-tokoh wanita lainnya adalah Ny. Erna Jayadiningrat, Ny. Maria Ulfah, Ny. Sukardjo Wiryopranoto, dan Ny. Suyatin Kartowiyono. Selain dapur umum Wani terdapat pula dapur umum yang diselenggarakan secara pribadi, seperti yang didirikan oleh Ny. Dahlia Roem dan lain-lain. Di Daerah-daerah lain di Indonesia pun didirikan dapur umum yang diselenggarakan oleh wanita baik oleh pribadi-pribadi maupun organisasi.

Di samping itu dalam rangka penyambutan Proklamasi diperlukan berbagai perlengkapan yang kelihatannya kecil tetapi sangat diperlukan, yaitu bendera Merah Putih, lencana merah putih, dan lain-lain. Untuk mengadakan perlengkapan itu banyak ibu-ibu yang harus bekerja keras, seperti Ny. Riyadi Sujatman di Manggarai (Jakarta) dan Ny. Siti Rujiah Pujo Utomo di Semarang san sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdurrachman Suryamiharjo, *Cita-cita Demokrasi Dalam Pendidikan Bangsa*, sebuah tinjauan Historis, Prisma No. 2/1977
2. Adam Malik, *Riwayat Dan Perjuangan Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945*, cetakan ketujuh, Jakarta, Penerbit Widjaya, 1982
3. Achmad Subardjo Djoyohadikusumo, *Kesadaran Nasional*, Sebuah Otobiografi, Jakarta, Penerbit Gunung Agung, 1978.
4. Bahder Johan, *Di Tangan Wanita*, Pidato Pada Kongres Pemuda Pertama Tahun 1926, Yayasan Idayu, Jakarta, 1980.
5. Benda, Harry Jl, *Bulan Sabid dan Matahari Terbit, Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, terjemahan Daniel Dhakidae, cetakan pertama, Jakarta, Penerbit Pustaka Jaya 1980.
6. *Bunga Ramapai Soempah Pemoeda 50 Tahun*, dihimpun oleh Yayasan, cetakan pertama, Jakarta, Penerbit Balai Pustaka, 1978
7. Chaniago J.R., dkk., *Lembaga Tinggi Negara*, Jakarta, Proyek IDSN, Depdikbud, 1987.

8. Dewantara B.S., *Ny. Hadjar Dewantarara*, Penerbit PT. Gunung Agung Jakarta, 1984.

9. Depdikbud, *Sejarah Kebangkitan Nasional, Daerah Sumatera Barat* Proyek Penelitian Kebudayaan Daerah, Jakarta, 1977/1978.

10. Drs. Suratmin dan Suhatno, BA., *Biografi Nasional, Tokoh*, Kongres Perempuan Indonesia Pertama (naskah belum diterbitkan), Depdikbud, Proyek IDSN, 1990/1991.

11. F. de Hoan Dalam Rochiati Wiriatmadja, *Dewi Sartika*, Depdikbud Proyek IDSN, tahun 1983.

12. Kartini, *Habis Gelap Terbitlah Terang*, dalam Siti Sumandari Suroto, *Kartini sebuah Biografi*, Gunung Agung, Jakarta, 1982.

13. Kowani, *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

14. Leirissa R.Z. cs, *Sejarah Pemikiran Tentang Sumpah Pemuda*, Proyek IDSN, Jakarta, 1987.

15. Manus, MPB., *Peranan Wanita Indonesia Di Masa Perang Kemerdekaan (1947–1950)*, Jakarta, Proyek IDSN, Depdikbud, 1985.

16. MPB Manus, Maria Walanda Maramis, Depdikbud, Proyek IDSN, 1982.

17. Mohammad Roem 70 Tahun, *Pejuang – Perunding*, cetakan pertama Jakarta, Penerbit Bulan Bintang, 1978.

18. Nana Nurliana, dkk., *Peranan Wanita Indonesia Di Masa Kemerdekaan 1945 – 1950*, Proyek IDSN, Depdikbud, Jakarta, 1986.

19. Rochiati Wiriatmadja, *Dewi Sartika*, Depdikbud, Proyek IDSN, Jakarta 1983.

20. Sartono Kartodirdjo cs, *Sejarah Nasional Indonesia V*, Depdikbud, Proyek IDSN, 1982/1983.

21. *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Editor, Narwati Djoened Poesponegoro, Nogroho Notosusanto, Jakarta, Penerbit Sinar Harapan, 1984.

23. *Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi, Kumpulan Pengalaman dan Pemikiran*, Buku II, Penyusun Lasmidjah Hardi, Jakarta, Penerbit Sinar Harapan, 1982.

24. *Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi, Kumpulan Pengalaman dan Pemikiran*, Buku III, cetakan pertama, Jakarta, Penerbit Sinar Harapan, 1983

25. *Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi, Kumpulan Pengalaman dan Pemikiran*, Buku IV, cetakan pertama, penyusun Lasmidjah Hardi Jakarta, Penerbit Sinar Harapan, 1984.

26. *Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi*, Buku V, Sinar Harapan, 1985.

27. Soebagiyo IN., SK. *Trimurti, Wanita Pengabdi Bangsa*, Cetakan pertama, Jakarta, Penerbit PT Gunung Agung, 1982.